



RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Dinas Pariwisata
Kabupaten Kutai Kartanegara

Kata Pengantar

Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya lah dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Tahun 2025-2029 selesai disusun. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para pihak yang telah membantu proses penyusunan ini dari awal hingga dokumen ini selesai disusun.

Dokumen Renstra ini merupakan dokumen perencanaan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 (lima) tahun kedepan. Dokumen Renstra akan menjelaskan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Dokumen Renstra ini akan menjadi pedoman dan panduan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan peran dan fungsi kewilayahan. Dokumen Renstra ini juga akan menjadi landasan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana target-target pembangunan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dicapai. Untuk itu Dokumen Renstra ini akan menjadi bahan untuk mengukur kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kami sesungguhnya meyakini bahwasannya dokumen ini masih belum sempurna. Kami mengharapkan masukan dari para pemangku kepentingan, agar Dokumen Renstra ini menjadi sempurna.

Tenggarong, 9 Februari 2026

Pt. Kepala Dinas,

Awang Agus Dharmawan, SE.,M.Si

Pembina TK 1 (IV.b)

NIP. 19720828 200112 1 008

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
BAB I	
PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	6
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Metode Penyusunan	8
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II	
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi dan Sumber Daya Perangkat Daerah	10
2.1.2 Sumberdaya Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara	16
2.1.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.1.3 Kelompok Sasaran Pelayanan	29
2.1.4 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian Layanan	29
2.2. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	29
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.2.2 Isu Strategis	29
2.3 Analisis Lingkungan Strategis	32
2.3.1 Lingkungan Internal	32
2.3.2 Lingkungan Eksternal	32
2.4 Analisis SWOT Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara	33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	35
3.1 Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	35
3.2 Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	35
3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	38
3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	40
BAB IV	
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	42
4.1 Uraian Program	42
4.2 Uraian Kegiatan	42

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif	125
4.4 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	125
4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD)	125
4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK)	132
BAB V	
PENUTUP	134

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanahkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah ini diharapkan menjadi wujud nyata perwujudan visi dan misi kepala daerah. Selain itu perencanaan pembangunan daerah menjadi kepanjangan tangan program-program pemerintah pusat yang bersifat nasional. Untuk itu perencanaan pembangunan daerah menjadi satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan nasional.

Pada tataran lebih praktis perencanaan pembangunan daerah, proses perencanaan pembangunan daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Pada UU No. 25 Tahun 2004 dijelaskan bahwa SPPN merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Terdapat beberapa dokumen perencanaan dalam SPPN. Pertama, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJP terbagi menjadi dua RPJP Nasional yang mengatur kebijakan RPJP yang sifatnya nasional dan RPJP Daerah yang mengatur kebijakan RPJP pada tingkat Pemerintah Daerah. Kedua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Ketiga, Rencana Pembangunan Kementerian Lembaga dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. Keempat, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Masing- masing dokumen perencanaan

dimaksud memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. RPJM merupakan terjemahan dari RPJP. Renstra merupakan turunan RPJM yang menterjemahkan secara konkrit tujuan dan sasaran dalam RPJM.

Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah merupakan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada perangkat daerah.

Penyusunan Renstra ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara pada tanggal 23 Juni 2025. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang mengamanatkan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 setelah pelantikan Kepala Daerah dan dilakukan secara bersamaan atau simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra di bidang Pariwisata juga disusun dengan memastikan bahwa seluruh kebijakan, pelayanan, dan program pembangunan memberikan manfaat yang adil dan setara bagi petani kecil, pembudidaya pertanian, perempuan petani, penyandang disabilitas, pelaku usaha mikro pertanian, masyarakat adat, serta kelompok rentan lainnya.

Mengingat penting dan perlunya penyusunan Renstra dimaksud, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyusun

Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2025-2030. Dokumen ini diharapkan mampu menjadi pedoman pembangunan kewilayahan dalam Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara hingga 5 (lima) tahun kedepan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Adapun dasar hukum penyusunan Dokumen Renstra ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 67).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi

Pemerintah Daerah Tahun 2025–2029.

8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor. 10 Tahun 2025 tentang RPJMD.
11. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara adalah mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan pariwisata untuk mewujudkan visi dan misi daerah dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang RPJMD.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara adalah

1. Merumuskan gambaran umum kondisi Kepariwisata sebagai dasar dalam perumusan permasalahan dan isu strategis Kepariwisata , juga sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan Kepariwisata 5 (lima) tahun kedepan.
2. Merumuskan kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan.
3. Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025-2029.
4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi

pagu anggaran dan target indikator kinerja, yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

5. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, yang merupakan perencanaan tahunan berupa program serta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan tahunan dan lima tahunan pembangunan daerah.
7. Menetapkan indikator dan dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 (lima) tahun.
8. Mewujudkan keselarasan antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Timur.

1.4 Metode Penyusunan

Metode penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Renstra. Langkah-langkah yang dilakukan adalah membentuk tim, melakukan penelaahan terhadap dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, dan menyusun jadwal dan mekanisme kerja.
2. Analisis Lingkungan Strategis. Langkah-langkah yang dilakukan adalah evaluasi kinerja periode sebelumnya (menganalisis capaian dan kendala yang dihadapi). Analisis isu strategis (mengidentifikasi tantangan dan peluang yang berpengaruh terhadap tujuan perangkat daerah) dan Analisis peraturan dan kebijakan (menyesuaikan dengan kebijakan nasional dan daerah).

3. Perumusan Tujuan, dan Sasaran. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah menentukan tujuan strategis untuk mencapai visi dan misi, dan menyusun sasaran kinerja yang terukur dan realistis.
4. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dan menyusun kebijakan operasional sebagai pedoman pelaksanaan program.
5. Perumusan Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah menyusun program dan kegiatan utama perangkat daerah, menentukan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan, dan menyelaraskan dengan sumber daya yang tersedia (anggaran, SDM, dan sarana).
6. Penyusunan Rancangan Renstra. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah mengintegrasikan seluruh hasil analisis dan perumusan dalam dokumen Renstra, melakukan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan, dan menyesuaikan rancangan dengan hasil konsultasi.
7. Penetapan Renstra. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah menyusun dokumen akhir Renstra, pengesahan renstra melalui peraturan kepala perangkat daerah, dan pemanfaatan renstra sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan (Renja).

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan dibahas tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan penyusunan Rencana Strategis tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Pada bagian ini berisi gambaran pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dan permasalahan serta isu strategis. Pada bagian gambaran pelayanan membahas tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, dan kelompok sasaran layanan.

BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini memuat program, kegiatan, sub kegiatan, dan prioritas sub kegiatan serta pagu indikatif. Selain itu pada bagian ini juga memuat target dalam indikator kinerja utama, dan indikator kinerja kunci.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi dan Sumber Daya Perangkat Daerah

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pariwisata merujuk pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata. Adapun susunan organisasi Dinas Pariwisata adalah sebagai berikut:

Susunan organisasi Dinas terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat yang membawahkan dan mengkoordinasikan Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.
3. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata;
4. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata;
5. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
6. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
7. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
8. UPTD.

Kepala Dinas mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data dan informasi serta melaksanakan urusan pemerintahan pilihan di bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah. Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan perumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data dan informasi di bidang pekerjaan umum;
2. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis

- dan administrasi di bidang Pariwisata;
3. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja di bidang Pariwisata;
 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, monitoring, dan evaluasi di bidang Pariwisata;
 5. Mengkoordinasikan penyusunan laporan di bidang Pariwisata;
 6. Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
 7. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati baik secara tertulis maupun lisan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi, serta mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan penganggaran, keuangan dan aset. Sekretaris mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, penyusunan program, serta keuangan dan aset;
2. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, penyusunan program, serta keuangan dan aset;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi/rb (pelaksanaan e-government, kompilasi standar operasional prosedur/sop, standar pelayanan/sp, dan perjanjian kinerja/pk, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, layanan pengaduan masyarakat, whistle blowing system/wbs, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi ppid pembantu);
4. Mengkoordinasikan dan menghimpun penyusunan Analisis Jabatan

(ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKPJ, LKPD, LkjIP dan LPPD), Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas menghimpun dan mengumpulkan data serta merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas Kepala Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
2. Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
3. Melaksanakan reformasi birokrasi (pelaksanaan e-government, kompilasi standar operasional prosedur, standar pelayanan, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, layanan pengaduan masyarakat, whistle blowing system, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi.

Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta

mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan pengelolaan daya tarik wisata dan kawasan Pariwisata, pemberdayaan masyarakat wisata, serta pengembangan daya tarik wisata dan usaha Pariwisata. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan pengelolaan daya tarik wisata dan kawasan Pariwisata, pemberdayaan masyarakat wisata, serta pengembangan daya tarik wisata dan usaha Pariwisata;
2. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan pengelolaan daya tarik wisata dan kawasan Pariwisata, pemberdayaan masyarakat wisata, serta pengembangan daya tarik wisata dan usaha Pariwisata;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan E-Government, Standar Operasional Prosedur dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
4. Mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, serta Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah urusan pengelolaan daya tarik wisata dan kawasan Pariwisata, pemberdayaan masyarakat wisata, serta pengembangan daya tarik wisata dan usaha Pariwisata;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang pengembangan destinasi dan usaha Pariwisata yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN

serta melaksanakan tata kelola arsip;

6. Mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan pengelolaan daya tarik wisata dan kawasan Pariwisata, pemberdayaan masyarakat wisata, serta pengembangan daya tarik wisata dan usaha Pariwisata;
7. Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
8. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

Bidang Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemasaran yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pemasaran mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan promosi Pariwisata, data dan informasi Pariwisata, serta kerjasama dan kemitraan Pariwisata. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pariwisata mempunyai fungsi:

1. melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan promosi Pariwisata, data dan informasi Pariwisata, serta kerjasama dan kemitraan Pariwisata.
2. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan promosi Pariwisata, data dan informasi Pariwisata, serta kerjasama dan kemitraan Pariwisata.
3. mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan E-Government, Standar Operasional Prosedur dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu).
4. mengoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja

serta Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah urusan promosi Pariwisata, data dan informasi Pariwisata, serta kerjasama dan kemitraan Pariwisata.

5. mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis Pariwisata Daerah.
6. mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang Pemasaran Pariwisata yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip.
7. mengoordinasikan penyusunan laporan urusan promosi Pariwisata, data dan informasi Pariwisata, serta kerjasama dan kemitraan Pariwisata;
8. memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan penyediaan dan peningkatan sarana prasarana Ekonomi Kreatif, pengembangan ruang kreasi serta kerjasama dan fasilitasi pengembangan Ekonomi Kreatif. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

1. melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan penyediaan dan peningkatan sarana prasarana Ekonomi Kreatif, pengembangan ruang kreasi serta kerjasama dan fasilitasi pengembangan Ekonomi Kreatif;

2. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan penyediaan dan peningkatan sarana prasarana Ekonomi Kreatif, pengembangan ruang kreasi serta kerjasama dan fasilitasi pengembangan Ekonomi Kreatif;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan E-Government, Standar Operasional Prosedur dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
4. mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, serta Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah urusan penyediaan dan peningkatan sarana prasarana Ekonomi Kreatif, pengembangan ruang kreasi serta kerjasama dan fasilitasi pengembangan Ekonomi Kreatif;
5. mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan :
 - a. penyediaan prasarana (Zona/ Ruang / Kota Kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan
 - b. berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah; dan
 - c. pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif.
6. mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang pengembangan Ekonomi Kreatif yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip;
7. mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan penyediaan dan

- peningkatan sarana prasarana Ekonomi Kreatif, pengembangan ruang kreasi serta kerjasama dan fasilitasi pengembangan Ekonomi Kreatif;
8. memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
 9. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, usaha Pariwisata serta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, usaha Pariwisata serta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
2. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, usaha Pariwisata serta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan E-Government, Standar Operasional Prosedur dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
4. Mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja

serta Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah urusan pengembangan Balai Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik Sertifikasi Elektronik (BSTE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

5. Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, usaha Pariwisata serta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
6. Mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan :
7. Pengembangan kapasitas pelaku Ekonomi Kreatif; dan
8. Pelaksanaan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar.
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip;
10. Mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, usaha Pariwisata serta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
11. Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
12. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

2.1.2 Sumberdaya Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki peran penting dalam menjalankan peran penting dalam Pengembangan hilirisasi dan pariwisata sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk itu Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara didukung oleh sumber daya sebagai berikut.

Tabel 1**Data Jenis Kelamin Sumber Daya Manusia Dinas Pariwisata**

No	Unit	Jumlah Pegawai		Jumlah
		PNS	P3K	
1	Sekretariat	34	20	54
2	Bidang Pemasaran Pariwisata	20	5	25
3	Bidang Pengembangan Sdm Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	44	0	44
4	Bidang Pengembangan Sdm Ekonomi Kreatif	15	5	20
5	Bidang Pengembangan Destinasi Dan Usaha Pariwisata	20	31	51
	Jumlah	133	61	194

Total jumlah pegawai di Dinas Pariwisata adalah 194 orang. Dari jumlah tersebut 133 orang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 61 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Tabel 2**Data Golongan Pegawai Dinas Pariwisata**

No	Unit	Golongan Ruang											Jumlah
		I/ d	II/ a	II/ b	II/ c	II/ d	III /a	III /b	III /c	III/ d	IV/ a	IV/ b	
1	Sekretariat		1		1	14	3	2	2	8	1	2	34
2	Pemasaran Pariwisata				1	11	2	1	1	4			20
3	Pengembangan Destinasi Dan Usaha Pariwisata		2	6	6	21	3	1	1	2	2		44

4	Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					9	1	1	3	3	3		20
5	Pengembangan Ekonomi Kreatif				2	5	2		2	3	1		15
Total		0	3	6	10	60	11	5	9	20	7	2	133

Pada komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 79 orang masuk dalam Golongan II, 45 orang masuk dalam Golongan III, dan 9 orang masuk dalam Golongan IV. Dengan kalimat lain sebagian besar atau 45% pegawai masih masuk dalam Golongan II.

Tabel 3

Data Tingkat Pendidikan PNS Dinas Pariwisata

No.	Urusan	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1	Sekretariat		1	15		15	3	34
2	Pemasaran Pariwisata			13		7		20
3	Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata		9	25	2	6	2	44
4	Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			10	2	5	3	20
5	Pengembangan Ekonomi Kreatif			7		7	1	15
Total			10	70	4	40	9	133

Dari segi tingkat pendidikan PNS Dinas Pariwisata sebanyak 10 orang memiliki ijazah SMP atau yang setara, 70 orang memiliki ijazah SMA atau yang setara, 4 orang memiliki ijazah D3 atau yang setara, 40 orang memiliki ijazah S1 atau yang setara, dan 9 orang memiliki ijazah Magister atau yang setara.

Tabel 4**Data Tingkat Pendidikan P3K Dinas Pariwisata**

No	Unit	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SD	SMP	SMA	DIII	S1	
1	Sekretariat	0	0	10	1	9	20
2	Bidang Pemasaran Pariwisata	0	0	2	0	3	5
3	Bidang Pengembangan Sdm Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	0	0	0	0	0	
4	Bidang Pengembangan Sdm Ekonomi Kreatif	0	0	1	1	3	5
5	Bidang Pengembangan Destinasi Dan Usaha Pariwisata	3	0	12	1	15	31
	Jumlah	3	0	25	3	30	61

Dari segi tingkat pendidikan P3K Dinas Pariwisata sebanyak 3 orang memiliki ijazah SD, 25 orang memiliki ijazah SMP atau yang setara, 3 orang memiliki ijazah SMA atau yang setara, 3 orang memiliki ijazah D3 atau yang setara, 30 orang memiliki ijazah S1 atau yang setara, dan 9 orang memiliki ijazah Magister atau yang setara.

Tabel 5**Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara**

No.	Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Tanah	6	Bidang	Berbagai Lokasi (Total Luas ~874,041 M ²)
2	Station Wagon (Toyota Innova, Toyota Rush)	7	Unit	Kendaraan Dinas
3	Sepeda Motor (Honda Vario, Honda Beat, Yamaha)	26	Unit	Kendaraan Dinas Operasional
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	3	Unit	Kendaraan Operasional

	Roda Tiga (Viar)			
5	Sepeda Air & Wahana Air (Kodok, Bebek, dll)	13	Unit	Wahana Wisata
6	Komputer PC (All-in-One & Desktop)	65	Unit	Peralatan Kerja
7	Laptop / Notebook	35	Unit	Peralatan Kerja
8	Tablet PC (iPad, Samsung Galaxy Tab)	5	Unit	Peralatan Pendukung
9	Printer (Epson, Canon, Brother)	19	Unit	Peralatan Kantor
10	Scanner	5	Unit	Peralatan Kantor
11	Monitor Komputer	12	Unit	Peralatan Kantor
12	Proyektor LCD / Infocus	13	Unit	Peralatan Presentasi
13	Televisi	15	Unit	Peralatan Informasi
14	Kamera Digital (DSLR, Mirrorless)	12	Unit	Peralatan Dokumentasi
15	Kamera Video (Sony, Handycam, GoPro)	7	Unit	Peralatan Dokumentasi
16	Drone (DJI, Autel)	3	Unit	Pemetaan & Dokumentasi Udara
17	Mesin Fotocopy	2	Unit	Peralatan Kantor
18	Mesin Absensi	8	Unit	Peralatan Kantor
19	CCTV	12	Unit	Peralatan Keamanan
20	Lemari Es	6	Unit	Peralatan Penunjang
21	Audio Amplifier & Sound System	8	Unit	Peralatan Audio
22	Microphone (Kabel & Wireless)	18	Unit	Peralatan Audio
23	Loudspeaker	10	Unit	Peralatan Audio
24	Stabilizer	1	Unit	Peralatan Listrik
25	UPS (Uninterruptible Power Supply)	12	Unit	Peralatan Listrik
26	Genset (Portable & Stationary)	11	Unit	Sumber Daya Listrik Cadangan
27	Mesin Pemotong Rumput	5	Unit	Pemeliharaan Taman
28	Mesin Chain Saw (Gergaji)	2	Unit	Pemeliharaan Taman
29	Pompa Air	3	Unit	Pemeliharaan
30	Alat Las Listrik	2	Unit	Pemeliharaan
31	Air Conditioner (AC) Split & Portable	25	Unit	Peralatan Penyejuk Ruangan

32	Meja Kerja (Biro, Eselon, Non Struktural)	85	Unit	Mebel Kantor
33	Kursi Kerja (Sekretaris, Pejabat, Non Struktural)	110	Unit	Mebel Kantor
34	Kursi Tamu & Rapat	45	Unit	Mebel Kantor
35	Lemari Besi/Metal (Arsip, Penyimpanan)	15	Unit	Mebel Kantor
36	Lemari Kayu/Jati	12	Unit	Mebel Kantor
37	Brandkas	3	Unit	Mebel Kantor
38	Meja Rapat	8	Unit	Mebel Kantor
39	Alat Rumah Tangga Lain-lain (Manekin, Tenda, dll)	50	Unit	Peralatan Penunjang Kegiatan
40	Alat Studio Video & Fotografi (Lighting, Tripod)	15	Unit	Peralatan Produksi
41	Alat Komunikasi Radio (HT)	22	Unit	Peralatan Komunikasi
42	Alat Pemadam Kebakaran Portable	1	Unit	Peralatan Keselamatan

Dinas Pariwisata juga didukung dengan berbagai macam aset. Paling tidak sebanyak 42 aset yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dalam rangka mencapai target kinerjanya.

2.1.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada periode 2019-2024 terdapat tiga sasaran Dinas Pariwisata, yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas, Meningkatnya kunjungan wisata di Kutai Kartanegara, dan Meningkatnya aktivitas Ekonomi Kreatif. Masing-masing sasaran diturunkan menjadi program sebagai berikut.

1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata
 - a. program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Meningkatnya kunjungan wisata
 - a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

- b. Program Pemasaran Pariwisata
3. Meningkatnya aktivitas Ekonomi Kreatif
- a. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
 - b. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Pada periode 2019-2024 seluruh program telah dilaksanakan dengan baik. Untuk itu seluruh target yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan maksimal. Demikian juga sasaran yang juga telah dicapai dengan maksimal.

Tabel 6

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah 2021 – 2024

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun ke-								Rasio Capaian Tahun ke-								Unit Penanggungjawab	K E T
					2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
3.2 6.3 .26 .01	Meningkatkannya aktivitas ekonomi kreatif	PROGRAM PUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Peringkat Daerah	68,88%	100%	Rp 76.809.213	0	0	100%	Rp 19.577.264	100%	Rp 33.551.684	100%	Rp 23.769.508	0	0	100%	Rp 18.054.425	100%	Rp 31.414.654	66%	Rp 11.286.827	0	0	100%	Rp 9,2	100%	Rp 9,363	66%	Rp 4,48	Dinas Pariwisata	

3.2 6.0 1.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peran Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi peran daerah	7 dokumen	6 laporan, 4 dokumen	Rp 2.62 9.78 1.00 0	0	0	4 dokumen, 2 laporan	Rp 366. 081. 000	5 Dokumen, 5 laporan	Rp 1.41 3.70 0.00	6 laporan, 4 dokumen	Rp 850. 000. 000	0	0	7 laporan	Rp 351. 868. 700	5 Dokumen, 5 laporan	Rp 1.27 3.72 3.52	3 dokumen, 1 laporan	Rp 177. 902. 287	0	0	7 laporan	9 , 6 , 1 2	5 Dokumen, 5 laporan	9 , 0 , 1 0	3 dokumen, 1 laporan	2 , 0 , 9 3	Dinas Pariwisata
3.2 6.0 1.2 .02	Administrasi Keuangan Peran Daerah	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta honorarium penatousahan keuangan daerah	12 bulan, 2 dokumen	12 bulan, 5 dokumen	Rp 47.2 20.7 06.5 09	0	0	12 bulan, 2 dokumen	Rp 14.8 36.6 13.5 43	12 bulan, 2 dokumen	Rp 14.4 12.9 38.2 18	12 bulan, 5 dokumen	Rp 17.9 71.1 54.7 48	0	0	12 bulan, 2 dokumen	Rp 13.6 35.2 04.3 86	12 bulan, 2 dokumen	Rp 13.7 00.0 38.7 43	12 bulan, 5 dokumen	Rp 9.23 9.19 7.93 8	0	0	6 laporan	9 , 1 , 9 0	2 laporan	9 , 5 , 0 5	2 laporan	5 , 1 , 4 1	Dinas Pariwisata

3.2 6.0 1.2 .03	Admi nistra si Baran g Milik Daera h pada Peran gkat Daera h	Jumla h bulan penye diaan gaji dan tunja ngan ASN serta honor arium penat ausah aan keuan gan daera h	12 lapo ran	12 lap ora n	Rp 266. 320. 000	0	0	12 la po ra n	Rp 70.6 60.0 00	2 lap ora n	Rp 195. 660. 000	0	Rp -	0	0	12 lap or an	Rp 52.8 60.0 00	2 lap ora n	Rp 156. 823. 879	0	Rp -	0	0	12 lap or an	7 4 , 8 1	2 lap ora n	8 0 , 1 5	0	0 , 0 0	Dinas Pariwi sata
3.2 6.0 1.2 .05	Admi nistra si Kepeg awaia n Peran gkat Daera h	Jumla h doku men monit oring kepeg awaia n dan tim BEKI AS	1 dok um en, 70 ora ng	2 Do ku me n, 53 ora ng	Rp 1.32 2.57 2.00 0	0	0	1 do ku me n	Rp 58.8 32.0 00	1 Do ku me n, 53 ora ng	Rp 663. 740. 000	2 Do ku me n, 53 ora ng	Rp 600. 000. 000	0	0	1 Do ku me n	Rp 55.2 32.0 00	1 Do ku ke mn , 53 ora ng	Rp 349. 129. 678	21 ora ng	Rp 65.8 88.0 76	0	0	1 Do ku me n	9 3 , 8 8	1 Do ku ke mn , 53 ora ng	5 2 , 6 0	21 or an g	1 0 , 9 8	Dinas Pariwi sata

3.2 6.0 1.2 .06	Admi nistra si Umu m Peran gkat Daera h	Jumla h jenis ATK,B ahan logisti k kanto r,bara ng cetak an dan pengg andaa n,dan rapat koordi nasi/ konsu ltasi	3 pak et, 1 lapo ran	8 pa ket , 12 lapo ra n	Rp 8.68 5.26 2.45 2	0 0	1 pa ket , 12 la po ra n	Rp 1.54 5.96 6.30 2	5 pa ket , 4 lapo ra n	Rp 5.78 9.29 6.15 0	8 pa ket , 12 lapo ra n	Rp 1.35 0.00 0.00 0	0 0	1 Pa ket , 12 La po ra n	Rp 1.54 2.73 8.01 9	5 pa ket , 4 lapo ra n	Rp 5.68 0.00 8.33 0	5 pa ket , 12 lapo ra n	Rp 561. 778. 168	0 0	1 Pa ket , 12 La po ra n	9 pa ket , 4 lapo ra n	9 pa ket , 1 lapo ra n	5 pa ket , 12 la po ra n	4 1 , 6 1	Dinas Pariwi sata
3.2 6.0 1.2 .07	Penga daan Baran g Milik Daera h Penun jang Urusa n Pemer intah Daera h	Jumla h Paket Penga daan Baran g Milik Daera h Penun jang Urusa n Pemer intah Daera h	26 unit ken dar aan , 330 pak et me ube ler, 289 unit per alat an mes	21 uni t ke nd ara an, 33 0 pa ket me ub ele r, 28 9	Rp 7.50 2.15 5.00 0	0 0	0	Rp -	21 uni t ke nd ara an, 33 0 pa ket me ub ele r, 28 9	Rp 7.50 2.15 5.00 0	0	Rp -	0 0	0	Rp -	21 uni t ke nd ara an, 33 0 pa ket me ub ele r, 28 9	Rp 7.24 1.35 3.78 9	0	Rp -	0 0	0	0 , 0 0 0	28 9 Un it, 33 0 Pa ket	9 , 6 , 5 2	0 , 0 0	Dinas Pariwi sata

3.2 6.0 1.2 .09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas pejabat yang dipelihara, kendaraan dinas operasional dan peralatan kantor yang dipelihara	32 unit	20 unit kendaraan, 16 unit peralatan mesin	Rp 1.826.540.000	0	0	36 unit	Rp 375.870.000	16 unit kendaraan, 21 unit peralatan mesin	Rp 788.670.000	20 unit kendaraan, 16 unit peralatan mesin	Rp 662.000.000	0	0	36 unit	Rp 355.001.791	16 unit kendaraan, 21 unit peralatan mesin	Rp 746.083.410	20 unit kendaraan, 16 unit peralatan mesin	Rp 144.255.428	0	0	12 Unit	94,45	219 unit	94,60	16 unit	21,79	Dinas Pariwisata
3.2 6.3 .26 .02	Meningkatkan kunjungan wisatawan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI, PARAWISATA	Persepsi Daya Tarik Wisata yang Menerima Aksesibilitas, Amenity dan Atraksi	28%	100%	Rp 101.823.321.575	0	0	100%	Rp 24.347.050.75	100%	Rp 27.836.271.00	100%	Rp 49.640.000	0	0	100%	Rp 5.566.577.49	100%	Rp 27.069.352	28,71%	Rp 2.148.477	0	0	100%	22,86	100%	97,24	28,71%	4,33	Dinas Pariwisata

3.2 6.0 2.2 .01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupatèn/Kota	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	1 dokumen	3 dokumen	Rp 795. 370. 000	0	0	3 dokumen	Rp 795. 370. 000	0	Rp -	0	Rp -	0	0	3 Dokumen	Rp 745. 391. 608	0	Rp -	0	Rp -	0	0	3 Dokumen	93,72	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
3.2 6.0 2.2 .02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupatèn/Kota	Jumlah lokasi yang memperoleh pembiayaan dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	Rp 4.70 5.38 0.00 0	0	0	4 dokumen	Rp 580. 380. 000	4 dokumen	Rp 1.15 0.00 0.00 0	1 dokumen	Rp 2.97 5.00 0.00 0	0	0	4 Dokumen	Rp 552. 593. 750	4 dokumen	Rp 1.02 0.67 3.34 3	0	Rp -	0	0	4 Dokumen	95,21	48,75	0	0	0	Dinas Pariwisata
3.2 6.0	Pengelolaan Destinasi	Jumlah entitas	1 dokumen	5 unit, 5 lap	Rp 94.1 92.5	0	0	2 desti	Rp 22.7 71.3	18 unit, 12	Rp 25.7 56.2	5 unit, 5 lap	Rp 45.6 65.0	0	0	4 Unit, 12	Rp 4.06 9.41	32 unit, 12	Rp 25.2 02.5	1 laporan	Rp 2.07 1.52	0	0	4 Unit, 12	17,32	97,71	15,40	4	Dinas Pariwisata	

3.2 6.3 .26 .04	Men ing kat nya akti vita s Eko no mi Kre atif	PROG RAM PENG EMBA NGAN EKON OMI KREA TIF MELA LUI PEMA NFAA TAN DAN PERL INDU NGAN HAK KEKA YAAN INTE LEKT UAL	Pelak u Ekon omi Kreat if yang Terfa silitas i	n/a %	10 0%	Rp 8.82 1.98 7.00 0	0	0	10 0%	Rp 2.35 0.00 0.00 0	10 0%	Rp 3.57 1.98 7.00 0	10 0%	Rp 2.90 0.00 0.00 0	0	0	10 0%	Rp 2.30 6.50 8.99 1	10 0%	Rp 3.52 6.03 7.81 3	23, 33 %	Rp 27.0 20.0 00	0	0	10 0%	9 8 , 1 5	10 0%	9 8 , 7 1	23 , 3 %	0 , 9 3	Dinas Pariw isata
3.2 6.0 4.2 .01		Penye diaan Prasar ana (Zona Kreati f/Rua ng Kraeti f /Kota Kreati f) sebag ai	Jumla h prasa rana ruang kreasi bagi insan kreatif	3 unit	3 uni t	Rp 3.42 1.98 7.00 0	0	0	4 uni t	Rp 750. 000. 000	9 uni t	Rp 1.92 1.98 7.00 0	3 uni t	Rp 750. 000. 000	0	0	4 un it	Rp 731. 166. 981	9 uni t	Rp 1.91 4.35 2.51 3	0 uni t	Rp 2.15 0.00 0	0	0	4 un it	9 7 , 4 9	9 9 , 6 0	1 la po ra n	0 , 2 9	Dinas Pariwi sata	

2.1.3 Kelompok Sasaran Pelayanan

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Pariwisata adalah wisatawan, pelaku usaha wisata, pelaku usaha industri kreatif, dan masyarakat secara umum.

2.1.4 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian Layanan

Mitra Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata adalah pihak-pihak yang bekerja sama atau berperan dalam mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, meliputi :

1. Perangkat Daerah lain di Lingkup Pemerintah Daerah, diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pemuda dan Olahraga.
2. Instansi Vertikal dan Pemerintah Pusat, diantaranya adalah Kementerian Pariwisata, Kementerian PUPR, Kementerian Kebudayaan, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
3. Bank Kaltimara sebagai mitra pemerintah daerah dalam penyediaan pendanaan dalam bentuk dukungan bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif .

2.2. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Masih kurangnya pengembangan destinasi wisata baru maupun revitalisasi objek wisata yang sudah ada
2. Regulasi yang belum sepenuhnya mendukung usaha pariwisata lokal
3. Belum optimalnya amenities pariwisata
4. Belum optimalnya potensi wisata alam dan budaya di Kawasan Strategis

Pariwisata Kabupaten (KSPK) dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) .

5. Kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung penguatan ekonomi kreatif

2.2.2 Isu Strategis

Terdapat beberapa isu strategis yang dihadapi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara untuk kondisi saat ini dan diprediksikan juga akan dialami di masa yang akan datang. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penguatan pariwisata berbasis budaya lokal dan pengembangan even unggulan. Isu ini terkait langsung dengan potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Kutai Kartanegara berupa keunikan budaya seperti tarian, adat, ritual, dan berbagai festival lokal. Namun demikian potensi ini belum sepenuhnya dikelola dengan baik. Padahal secara global saat ini pariwisata berbasis budaya sedang menjadi tren. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah guna menguatkan pariwisata berbasis budaya lokal dan pengembangan event unggulan.
2. Pengembangan destinasi wisata alam unggulan berbasis ekonomi berkelanjutan. Isu ini juga terkait dengan potensi keindahan alam yang dimiliki oleh Kabupaten Kutai kartanegara, seperti sungai, danau, laut, hutan, dan lainnya Nam demikian, potensi ini belum dimanfaatkan dengan baik yang terlihat dari nilai amenities yang belum maksimal. Secara global perkembangan wisata berkelanjutan masih menjadi tren. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah strategis guna mengembangkan destinasi wisata alam unggulan berbasis ekonomi berkelanjutan.
3. Revitalisasi dan pengembangan destinasi sejarah dan wisata edukasi berbasis kearifan lokal. Isu ini terkait dengan banyaknya situs peninggalan sejarah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun demikian pengembangan destinasi sejarah ini masih kurang dilakukan. Untuk itu Dinas Pariwisata melakukan langkah-langkah strategis untuk

- merevitalisasi dan mengembangkan destinasi wisata sejarah dan edukasi.
4. Penguatan amenitas, regulasi, dan integrasi UMKM lokal dalam industri pariwisata daerah. Isu ini terkait dengan potensi kerajinan lokal dan UMKM Kabupaten Kutai Kartanegara yang besar. Namun demikian, potensi yang besar ini tidak ditindaklanjuti dengan regulasi yang mendukung. Untuk itu Dinas Pariwisata dianggap perlu dan penting untuk memberikan kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM lokal.
 5. Penguatan ekonomi kreatif. Pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2025–2029, sektor ekonomi kreatif diposisikan sebagai penggerak pertumbuhan dan diversifikasi ekonomi, dengan kontribusi 6,92% PDB nasional dan serapan tenaga kerja mencapai 26,47 juta orang pada tahun 2024. Bagi pemerintah kota dan kabupaten, kondisi ini perlu ditindaklanjuti dengan mendorong lahirnya pusat pertumbuhan ekonomi kreatif baru. Pemerintah daerah akan mampu merancang intervensi yang lebih presisi berbasis potensi lokal, meningkatkan daya saing pelaku kreatif, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat identitas budaya daerah sebagai bagian dari pembangunan ekonomi kreatif nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 2.1

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Keunikan budaya (tarian, adat, ritual, festival lokal)	Belum optimalnya potensi wisata alam dan budaya di Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten (KSPK) DAN Kawasan pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK)	Pelestarian budaya lokal dan warisan tak benda	Tren pariwisata berbasis budaya dan pengalaman otentik	Pengembangan event calendar Kaltim berbasis budaya	Festival Erau dan budaya lokal sebagai objek pariwisata berkelanjutan	Penguatan pariwisata berbasis budaya lokal dan pengembangan event unggulan daerah
Keindahan alam (sungai, danau, laut & pantai, hutan, ekowisata)	Belum optimalnya amenities pariwisata	Perlindungan ekosistem dan pengelolaan berkelanjutan	Peningkatan minat wisata ekologi &berkelanjutan (ecotourism)	Prioritas pengembangan destinasi wisata di Kalimantan (diversifikasi pariwisata)	Pemaksimalan destinasi wisata Sungai Mahakam, Pulau Kumala, dan objek wisata alam lokal	Pengembangan destinasi wisata alam unggulan berbasis ekonomi berkelanjutan

Daya tarik sumber daya historis (peninggalan kerajaan kutai, situs sejarah, museum)	masih kurangnya pengembangan destinasi wisata baru maupun revitalisasi objek wisata yang sudah ada	Konservasi cagar budaya dan situs sejarah	Tren wisata edukasi dan heritage	Dukungan revitalisasi destinasi sejarah melalui Kemenparekraf dan Kementerian Kebudayaan	optimalisasi fasilitas dan promosi situs Kerajaan dan Museum	Revitalisasi dan pengembangan destinasi sejarah dan wisata edukasi berbasis kearifan lokal
Karakteristik lokal (kerajinan, kuliner khas, UMKM pariwisata)	regulasi yang belum sepenuhnya mendukung usaha pariwisata lokal	Peningkatan inklusi ekonomi masyarakat lokal dalam pariwisata	Pariwisata inklusif & ramah UMKM	Pemberdayaan UMKM kreatif dalam ekosistem pariwisata	Integrasi produk kuliner dan kerajinan Kukar dalam rantai nilai pariwisata	Penguatan amenities, regulasi, dan integrasi UMKM lokal dalam industri pariwisata daerah
Industri kreatif yang terus berkembang	Kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung penguatan ekonomi kreatif	Pengembangan ekonomi kreatif	Diversifikasi produk ekonomi kreatif	Penguatan ekonomi kreatif sebagai kekuatan ekonomi nasional	Penguatan kebijakan ekonomi kreatif	Penguatan industri kreatif

2.3 Analisis Lingkungan Strategis

Analisis lingkungan strategis disusun untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara. Analisis ini menjadi landasan dalam merumuskan isu strategis, tujuan, sasaran, serta strategi pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif daerah.

2.3.1 Lingkungan Internal

Lingkungan internal menggambarkan kondisi aktual organisasi yang memengaruhi kinerja pelayanan. Faktor internal tersebut meliputi sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana, serta dukungan pendanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

2.3.2 Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal merupakan faktor di luar organisasi yang memengaruhi penyelenggaraan urusan pariwisata dan ekonomi kreatif, meliputi kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, dinamika sosial ekonomi masyarakat, perkembangan teknologi, serta tren pembangunan pariwisata.

2.4 Analisis SWOT Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara

Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebagai dasar penentuan arah kebijakan dan strategi pembangunan pariwisata daerah.

Kekuatan (Strengths) <ul style="list-style-type: none">- Potensi destinasi alam, budaya, dan sejarah- Dukungan kebijakan daerah- Kelembagaan pariwisata yang jelas	Kelemahan (Weaknesses) <ul style="list-style-type: none">- Kualitas dan kuantitas SDM terbatas- Sarana prasarana belum merata- Promosi belum optimal dan terintegrasi
Peluang (Opportunities) <ul style="list-style-type: none">- Dukungan program pusat dan provinsi- Tren wisata berkelanjutan- Perkembangan teknologi digital	Ancaman (Threats) <ul style="list-style-type: none">- Persaingan antar daerah- Fluktuasi kondisi ekonomi- Risiko degradasi lingkungan

2.5 Penajaman Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis dan SWOT, dirumuskan isu

strategis sebagai fokus penanganan dalam periode perencanaan Renstra.

Isu Strategis	Uraian Singkat
Daya saing destinasi pariwisata	Belum optimalnya kualitas destinasi dan daya tarik wisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan.
Kapasitas SDM dan kelembagaan	Keterbatasan kompetensi SDM dan penguatan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif.
Promosi dan pemasaran pariwisata	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam promosi pariwisata daerah.
Peran serta masyarakat	Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha lokal.
Sinergi lintas sektor	Perlunya penguatan koordinasi dan kemitraan lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu tertentu. Selain itu tujuan merupakan wujud nyata dari implementasi dari pernyataan misi. Tujuan harus dapat diukur untuk jangka waktu 5 tahun mendatang dan didasarkan pada Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan dan sesuai dengan sasaran RPJMD tahun 2025-2029. Adapun tujuan yang ingin diwujudkan adalah: ***Meningkatkan pengembangan potensi dan daya tarik wisata.***

3.2 Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh organisasi pemerintah dalam waktu jangka pendek tertentu, seperti: tahunan, semesteran, dan bulanan. Sasaran akan diukur keberhasilannya melalui indikator kinerja sasaran. Sasaran disesuaikan dengan tujuan yang akan diwujudkan. Adapun sasaran dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

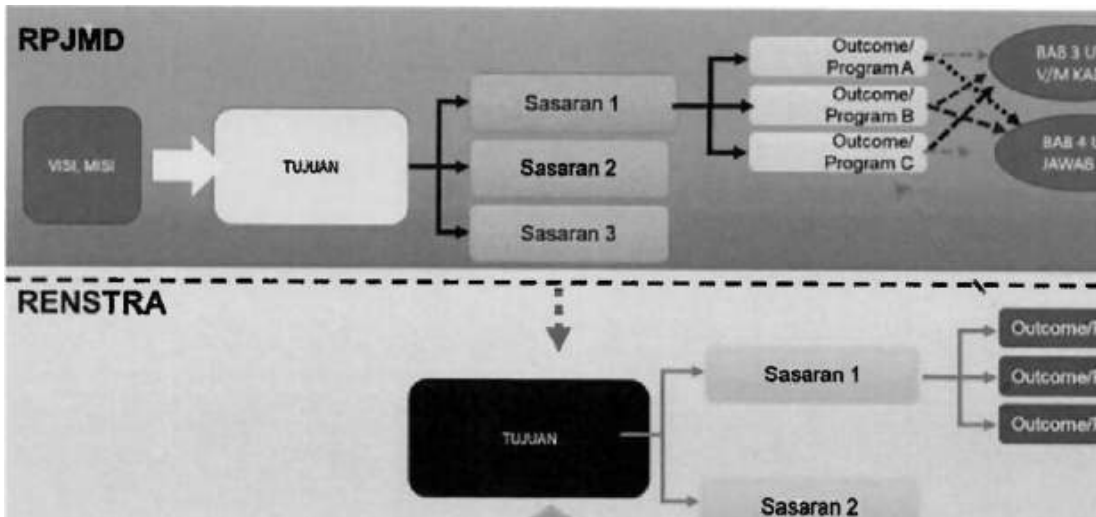
1. ***Meningkatnya nilai tambah fasilitas pendukung sektor pariwisata.***
2. ***Meningkatnya kunjungan jumlah wisatawan.***

Gambar. 3.1 Konsep Renstra



Gambar 3.2

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra



Tabel 3.3

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun						Keterangan	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Meningkatkan pengembangan potensi dan daya tarik wisata											
		Meningkatnya nilai tambah fasilitas pendukung sektor pariwisata	Kontribusi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap PDRB**	0.30	0.28	0.27	0.25	0.24	0.22	0.21		
		Meningkatnya kunjungan jumlah wisatawan	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	148.56	3.18	4.08	4.90	5.04	5.13	5.28		

			Mancanegara								
			Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Kreatif (orang)	-20.58	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90	

3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dinas Pariwisata memiliki peran yang penting untuk meningkatkan pembangunan berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk mewujudkan target dimaksud maka Dinas Pariwisata dengan melakukan beberapa strategi utama, yang dijelaskan dalam tabel berikut:

1. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan.
2. Integrasi kawasan pariwisata unggulan berbasis wisata alam, budaya dan agrowisata produktif .

Tabel 3.4

Penahapan Renstra Perangkat Daerah

	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
	Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan,	Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan,	Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan,	Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan,	Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan,
	Integrasi kawasan pariwisata unggulan berbasis wisata alam, budaya dan agrowisata produktif	Integrasi kawasan pariwisata unggulan berbasis wisata alam, budaya dan agrowisata produktif	Integrasi kawasan pariwisata unggulan berbasis wisata alam, budaya dan	Integrasi kawasan pariwisata unggulan berbasis wisata alam, budaya dan	Integrasi kawasan pariwisata unggulan berbasis wisata alam, budaya dan

			agrowisata produktif	agrowisata produktif	agrowisata produktif
Pengembangan Pemasaran	Kerjasama promosi pariwisata dengan pihak swasta	Peningkatan promosi digital & branding destinasi wisata	Layanan digital & digitalisasi informasi pariwisata	Penguatan branding & promosi wisata berkelanjutan di pasar nasional & internasional	Revitalisasi destinasi wisata dan ekonomi kreatif berdasarkan hasil evaluasi
Pengembangan Destinasi Pariwisata dan usaha	Pengembangan konsep dan regulasi destinasi wisata (Rencana induk pariwisata daerah)	Penyusunan perencanaan infrastruktur dan aksesibilitas	Peningkatan akses dan infrastruktur dasar penunjang pariwisata	Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur & fasilitas layanan yang sudah dibangun	Harmonisasi dan kemandirian masyarakat bersama pemerintah daerah dalam pengembangan /pengelolaan destinasi pariwisata
Pengembangan Parekr af SDM	Edukasi & aktivitas konservasi lingkungan berbasis wisata	Penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata	Penguatan sinergi masyarakat-pemerintah dalam pengelolaan wisata	Penguatan peran bumdes & komunitas lokal dalam mendukung pariwisata	Peningkatan kapasitas SDM Parekr af dalam rangka penguatan tenaga kerja bidang parekr af yang unggul dan

					mampu bersaing secara global
Pengembangan Ekraf dan Perlindungan HAKI	Kajian dan diversifikasi produk wisata	Pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	Pengembangan kemitraan ekonomi kreatif berbasis pariwisata	Pengembangan kemitraan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan Budaya serta kearifan lokal	Revitalisasi destinasi wisata dan ekonomi kreatif berdasarkan hasil evaluasi

3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Berdasarkan operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), Renstra Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara menetapkan dua arah kebijakan utama yang selaras dengan RPJMD Kabupaten dan regulasi nasional. Terdapat 4 (empat) arah kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas Pariwisata, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penguatan potensi usaha pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata.
2. Pengelompokkan destinasi wisata alam, budaya dan agrowisata dalam satu kesatuan kawasan pengembangan yang saling terhubung, berbasis potensi lokal dan keunikan sumber daya alam dan budaya Kutai Kartanegara.
3. Penguatan konektivitas dan aksesibilitas antar destinasi pariwisata secara terintegrasi dan tematik.
4. Peningkatan kualitas amenities dan layanan pariwisata, melalui penyediaan fasilitas pendukung yang layak, ramah lingkungan, inklusif, dan berstandar internasional.

Tabel 3.5

Teknik Arah Kebijakan Perangkat Daerah

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan PD	Ket
1	Terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat	Meningkatnya fondasi perekonomian yang maju, terintegrasi dan berkelanjutan	<p>Penguatan potensi usaha pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata</p> <p>Pengelompokkan destinasi wisata alam, budaya dan agrowisata dalam satu kesatuan kawasan pengembangan yang saling terhubung, berbasis potensi lokal dan keunikan sumber daya alam dan budaya Kutai Kartanegara</p> <p>Penguatan konektivitas dan aksesibilitas antar destinasi pariwisata secara terintegrasi dan tematik</p> <p>Peningkatan kualitas amenities dan layanan pariwisata, melalui penyediaan fasilitas pendukung yang layak, ramah lingkungan, inklusif, dan berstandar internasional</p>	

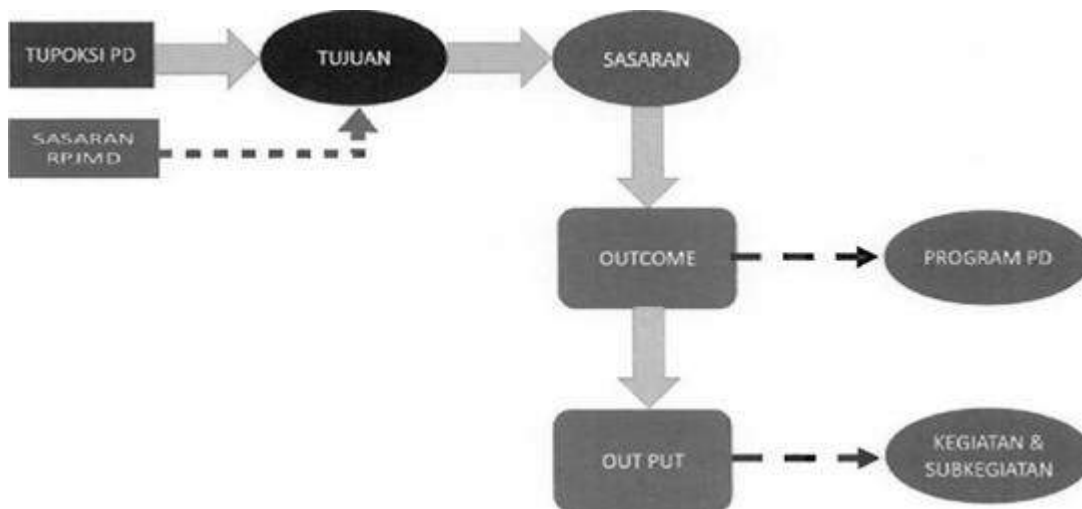
BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Rencana strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang berisikan rencana pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun. Sebagai dokumen rencana maka dokumen ini memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Strategi kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan disajikan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan



Terdapat beberapa program yang menjadi rencana pelaksanaan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tahun 2025-2029. Diantaranya adalah sebagai berikut

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

3. Program Pemasaran Pariwisata
4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

4.2 Uraian Kegiatan

Guna mengimplementasikan kedua program dimaksud, Dinas Pariwisata memiliki beberapa kegiatan sebagai berikut.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - a. Penetapan rencana induk pariwisata di Kabupaten/Kota
 - b. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - c. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - d. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - e. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah

Kabupaten/Kota

3. Program Pemasaran Pariwisata
 - a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - b. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
 - a. Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif Di Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
 - a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 - b. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
 - c. Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tabel 4.2

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
Pengembangan hilirisasi dan pariwisata sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif							
	Meningkatkan pengembangan potensi dan daya						

	tarik wisata						
		Meningkatnya nilai tambah fasilitas pendukung sektor pariwisata					
		Meningkatnya kunjungan jumlah wisatawan					
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

			perangkat daerah				
				Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah Dokumen	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya dokumen perencanaan	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	
				Tersusunnya dokumen penganggaran	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	
				Tersusunnya dokumen perubahan penganggaran	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	
				Tersusunnya dokumen penganggaran	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi</i>	<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	

					<i>Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>		
				Tersusunnya dokumen perubahan penganggaran	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD</i>	
				Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja perangkat daerah	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	
				Tersusunnya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	

				<i>Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah</i>	<i>Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah</i>	
				<i>Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	
				<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah</i>	<i>Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah</i>	
				<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra Renja PD yang disusun</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra Renja PD yang disusun</i>	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD</i>	

				<i>Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional Melalui Koordinasi Teknis Pembangunan</i>	<i>Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional Melalui Koordinasi Teknis Pembangunan</i>	<i>Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan</i>	
				<i>Jumlah Substansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu</i>	<i>Jumlah Substansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu</i>	<i>Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu</i>	
				Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	
				Terlaksananya pelayanan administrasi pelaksanaan tugas ASN	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi</i>	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	

					<i>Pelaksanaan Tugas ASN</i>		
				Terlaksananya verifikasi keuangan perangkat daerah	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	
				Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi perangkat daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	
				Tersusunnya bahan tanggapan pemeriksaan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>	<i>Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</i>	

				<p><i>Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i></p>	<p><i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i></p>	<p><i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i></p>	
				<p>Tersusunnya analisis prognosis realisasi anggaran</p>	<p><i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i></p>	<p><i>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i></p>	
				<p>Tersusunnya laporan administrasi barang milik daerah</p>	<p>Jumlah Laporan</p>	<p>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p>	
				<p>Tersusunnya rencana kebutuhan barang milik daerah</p>	<p><i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i></p>	<p><i>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i></p>	
				<p>Terlaksananya pengamanan barang milik daerah</p>	<p><i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i></p>	<p><i>Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i></p>	

				Terlaksananya koordinasi dan penilaian barang milik daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</i>	<i>Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</i>	
				Terlaksananya pengendalian barang milik daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	<i>Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	
				Terlaksananya rekonsiliasi barang milik daerah	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	<i>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	
				Tersusunnya laporan penatausahaan barang milik daerah	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	
				Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD</i>	<i>Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD</i>	

				Tersusunnya laporan pendapatan daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
				<i>Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan retribusi yang disusun.</i>	<i>Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	
				<i>Tersusunnya Dokumen Analisa & Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi</i>	<i>Jumlah dokumen analisis dan kebijakan retribusi yang disusun.</i>	<i>Analisa & Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi</i>	
				<i>Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah</i>	<i>Jumlah kegiatan penyuluhan kebijakan retribusi yang dilaksanakan.</i>	<i>Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah</i>	
				<i>Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah</i>	<i>Jumlah objek retribusi yang berhasil didata dan didaftarkan.</i>	<i>Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah</i>	

				<i>Terlaksananya Pengolahan Data Retribusi Daerah</i>	<i>Jumlah data retribusi yang diolah dan dianalisis secara berkala.</i>	<i>Pengolahan Data Retribusi Daerah</i>	
				<i>Terlaksananya Penetapan Wajib Retribusi Daerah</i>	<i>Jumlah wajib retribusi yang ditetapkan berdasarkan verifikasi data.</i>	<i>Penetapan Wajib Retribusi Daerah</i>	
				<i>Terlaksananya Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	<i>Jumlah laporan pengelolaan retribusi yang disusun dan disampaikan.</i>	<i>Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	
				Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				<i>Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	<i>Peningkatan Saranadan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	
				<i>Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	

				<i>Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	
				<i>Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	
				<i>Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	<i>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	
				<i>Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun</i>	<i>Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan</i>	<i>Pemulangan Pegawai yang Pensiun</i>	
				<i>Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas</i>	<i>Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas</i>	
				<i>Terlaksananya Pemindehan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah ASN yang Dipindah tugaskan</i>	<i>Pemindehan Tugas ASN</i>	

				<i>Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	
				<i>Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan</i>	<i>Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan</i>	
				<i>Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				<i>Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	

				<i>Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	
				<i>Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	
				<i>Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	
				<i>Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	
				<i>Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan</i>	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</i>	
				<i>Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material</i>	<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	<i>Penyediaan Bahan/Material</i>	
				<i>Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	

				<i>Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	
				<i>Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	<i>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	
				<i>Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	<i>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				<i>Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	<i>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	

				<i>Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	
				<i>Terlaksananya Pengadaan Alat Besar</i>	<i>Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan</i>	<i>Pengadaan Alat Besar</i>	
				<i>Terlaksananya Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor</i>	<i>Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan</i>	<i>Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor</i>	
				<i>Terlaksananya Pengadaan Mebel</i>	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	<i>Pengadaan Mebel</i>	
				<i>Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	
				<i>Terlaksananya Pengadaan Aset Tetap Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan</i>	<i>Pengadaan Aset Tetap Lainnya</i>	
				<i>Terlaksananya Pengadaan Aset Tak Berwujud</i>	<i>Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan</i>	<i>Pengadaan Aset Tak Berwujud</i>	

				<i>Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	<i>Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	
				<i>Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	
				<i>Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	

				<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	
				<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	
				<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang</i>	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan</i>	

				<i>Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	<i>Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	
				<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	
				<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar</i>	<i>Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya</i>	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar</i>	
				<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor</i>	<i>Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya</i>	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor</i>	

				<i>Terlaksananya Pemeliharaan Mebel</i>	<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	<i>Pemeliharaan Mebel</i>	
				<i>Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	
				<i>Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya</i>	<i>Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara</i>	<i>Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya</i>	
				<i>Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud</i>	<i>Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara</i>	<i>Pemeliharaan Aset Tak Berwujud</i>	
				<i>Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i</i>	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	
				<i>Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i</i>	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	

				<i>Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	
				<i>Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah</i>	<i>Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi</i>	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah</i>	
			Meningkatnya kunjungan jumlah wisatawan; (WISMAN, WISNUS)		Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
				<i>Tersusunnya dokumen rencana induk pariwisata di Kabupaten/Kota</i>	<i>Tersedianya dokumen Rencana Induk Pembangunan</i>	<i>Penetapan rencana induk pariwisata di Kabupaten/Kota</i>	

					Kepariwisataan di Kabupaten/Kota		
				Terlaksananya penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten/Kota	Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten/Kota	
				<i>Terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</i>	Jumlah daya tarik wisata yang dikelola	<i>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</i>	
				Terlaksananya Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pematapan, Revitalisasi)	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penetapan Daya Tarik Wisata	Jumlah Lokasi Tarik Unggulan Kabupaten/Kota	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	

				Unggulan Kabupaten/Kota			
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	Peningkatan Kapasitas SDM pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
				<i>Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya</i>	<i>Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</i>	

				<i>Tarik Wisata Kabupaten/ Kota</i>	<i>Tarik Wisata Kabupaten/ Kota</i>		
				<i>Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Kawasan strategis pariwisata yang dikelola</i>	<i>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	
				<i>Terlaksananya Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	<i>Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	<i>Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	
				<i>Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	<i>Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	<i>Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	
				<i>Terlaksananya Pengadaan/ Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	<i>Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	

				Terlaksananya Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Kabupaten/Kota yang	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis	

					Tersedia dan Terpelihara		
				Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana yang dikelola	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
				<i>Terlaksananya Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan</i>	<i>Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	
				<i>Terlaksananya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	<i>Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	
				<i>Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)</i>	<i>Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	

				<i>Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara</i>	<i>Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	
				<i>Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	
				<i>Terlaksananya Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	<i>Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	
				<i>Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Pembangunan</i>	<i>Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan</i>	<i>Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten/Kota</i>	

				<i>Kepariwisataan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Kepariwisataan Daerah Kabupaten/ Kota</i>		
				<i>Terlaksananya Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/ Kotamadya</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/ Kotamadya</i>	<i>Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/ Kotamadya</i>	
				<i>Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	<i>Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	
				<i>Terlaksananya Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Usaha Pariwisata yang direkomendasikan untuk mendapat TDUP</i>	<i>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</i>	
				Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan	Jumlah usaha pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam	

				SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota		melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota	
				Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota	

				Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata Di Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata Di tingkat Kab/Kota	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata Di Tingkat Kab/Kota	
				Terlaksananya Sertifikasi standar usaha pariwisata yang diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi	Sertifikat standar usaha pariwisata yang diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	
				Terlaksananya pengurusan standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	
				Terlaksananya Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	

				Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	(Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	
				Terlaksananya Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten/Kota	Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten/Kota	Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kunjungan jumlah wisatawan; (WISMAN		Persentase Peningkatan Media Pemasaran pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	

			WISNUS)				
				<i>Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	Jumlah pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	<i>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	
				<i>Tersedianya Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	<i>Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri</i>	
				<i>Terlaksananya Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri</i>	<i>Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri</i>	<i>Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri</i>	

				<i>Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	<i>Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	
				<i>Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata</i>	<i>Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata</i>	
				<i>Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	<i>Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri</i>	
				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	

				<i>Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan</i>	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan</i>	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan</i>	
				<i>Terlaksananya Fasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah</i>	<i>Jumlah badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah Yang Dibentuk</i>	<i>Fasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah</i>	
			Meningkatnya nilai tambah fasilitas pendudukan sektor pariwisata		Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	

				<i>Tersedianya Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif Di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Prasarana Yang Tersedia</i>	<i>Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif Di Daerah Kabupaten/Kota</i>	
				Terlaksananya Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	
				<i>Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</i>	<i>Jumlah Ekosistem Ekonomi Kreatif yang dikembangkan</i>	<i>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</i>	
				<i>Terlaksananya Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif</i>	<i>Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan</i>	

				<i>Terlaksananya Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif</i>	<i>Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif</i>	<i>Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif</i>	
				<i>Terlaksananya Fasilitasi pemberian insentif</i>	<i>Jumlah Insentif yang Diberikan</i>	<i>Fasilitasi pemberian insentif</i>	
				<i>Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah</i>	<i>Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah</i>	<i>Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah</i>	
				<i>Terlaksananya pemberian Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)</i>	<i>Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan bantuan pemerintah</i>	<i>Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)</i>	
				<i>Terlaksananya fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual</i>	<i>Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual</i>	<i>Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual</i>	
				<i>Terlaksananya Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi</i>	<i>Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual</i>	

					<i>Kreatif berbasis kekayaan intelektual</i>		
				<i>Terlaksananya Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah</i>	<i>Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah</i>	<i>Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah</i>	
				<i>Terlaksananya Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif</i>	<i>Jumlah terlaksananya pendukung pemasaran ekonomi kreatif</i>	<i>Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif</i>	
				<i>Terlaksananya Penyusunan Skema Insentif Daerah</i>	<i>Tersedianya skema insentif ekonomi kreatif</i>	<i>Penyusunan Skema Insentif Daerah</i>	
				<i>Terlaksananya Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah</i>	<i>Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah</i>	<i>Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah</i>	
				<i>Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</i>	<i>Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</i>	

				<i>Terlaksananya Perlindungan Hasil Kreativitas</i>	<i>Jumlah Peraturan Daerah Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif</i>	<i>Perlindungan Hasil Kreativitas</i>	
				<i>Terlaksananya Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual</i>	<i>Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif,serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif</i>	<i>Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual</i>	
			Meningkatnya nilai tambah fasilitas penduduk sektor		Presentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	

			pariwisata				
			a				
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM dan Ekraf yang dilaksanakan	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
				<i>Terlaksananya Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif</i>	<i>Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif</i>	
				<i>Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</i>	<i>Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</i>	<i>Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</i>	

				<i>Terlaksananya Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI</i>	<i>Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI</i>	<i>Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI</i>	
				<i>Terlaksananya Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata</i>	<i>Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata</i>	<i>Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata</i>	
				<i>Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata</i>	<i>Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata</i>	
				<i>Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</i>	<i>Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</i>	

				<p><i>Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata</i></p>	<p><i>Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata</i></p>	<p><i>Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (tidak ada dalam nomenklatur kepmendagri 900 tahun 2024)</i></p>	
				<p><i>Terlaksananya Pelatihan Dasar Sdm Kepariwisataaan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)</i></p>	<p><i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)</i></p>	<p><i>Pelatihan Dasar Sdm Kepariwisataaan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) (tidak ada dalam nomenklatur kepmendagri 900 tahun 2024)</i></p>	
				<p>Terlaksananya proses pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif</p>	<p>Jumlah pelaku ekraf yang dikembangkan</p>	<p>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</p>	
				<p>Terlaksananya pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif</p>	<p><i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan</i></p>	<p><i>Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif</i></p>	

					<i>Pendampingan Ekonomi Kreatif</i>		
				Terlaksananya fasilitas menghadapi perkembangan teknologi didunia usaha	<i>Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha</i>	<i>Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha</i>	
				Terlaksananya Fasilitas Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Subsektor Ekonomi Kreatif	<i>Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah dan legal</i>	<i>Fasilitas Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Subsektor Ekonomi Kreatif</i>	
				Terlaksananya Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/ Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	<i>Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/ Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif</i>	<i>Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/ Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif</i>	

				<p><i>Terlaksananya Pelatihan Asesor Kompetensi/ Workplace Assessor(WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif</i></p>	<p><i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/ Workplace Assessor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif</i></p>	<p><i>Pelatihan Asesor Kompetensi/ Workplace Assessor(WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif</i></p>	
				<p><i>Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif</i></p>	<p><i>Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif</i></p>	<p><i>Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif</i></p>	
				<p>Terlaksananya pengembangan kapasitas SDM bidang pariwisata dan ekonomi kreatif</p>		<p>Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p>	
				<p>Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan OAP dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif</p>	<p><i>Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan Bagi OAP dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi OAP Yang Dilaksanakan</i></p>	<p><i>Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</i></p>	

Tabel 4.3

Rencana Program/kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangka t Daerah		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan			Pertumbuhan PAD Sektor	Person	3.34	1.05		1.06		1.07		1.08		1.09		1.05		1.05		Kepala

an pen gem ban gan pote nsi dan day a tari k wis ata			Pariwisat a																Dina s
Me nin gka tny a nila i tam bah fasil			Kontribusi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Per sen	0.3 0	0. 2 8	0. 27	0. 2 5	0. 2 4	0. 2 2	0. 2 2	0. 2 1	0. 21						Kepala Dinas

	itas pen duk ung sekt or pari wis ata		terhadap PDRB**																
	Me nin gka tny a kun jun gan jum lah wis ata wan		Pertumbu han Kunjunga n Wisatawa n Mancaneg ara	Per sen	148 .56	3. 1 8	4. 08		4. 9 0		5. 0 4		5. 1 3		5. 2 8		5. 28		Kepal a Dina s

			Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Per sen	- 20.58	1.40		1.50		1.60		1.70		1.80		1.90		1.90		Kepala Dinas	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	68.88	74.00	24,300,00	75.00	23,000,00	77.00	23,300,00	75.00	23,100,00	76.00	22,700,00	75.00	22,800,00	76.00	22,700,00	76.114,495,410,461.00	Sekretaris
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen	12	11.00	1,350,00	9.00	950,000.00	20.00	989,583.00	20.00	1,100,00	20.00	1,100,79	21.00	1,100,00	90.00	5,240,374,493.00	JF Perencana	

		<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Do ku me n	3		450,000.00	2.150,000.00	2.200,000.00	2.200,000.00	2.200,000.00	2	200,790.954.00	3.200,000.00	11.00	950,790,954.00	JF Perencanaan
		<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	Do ku me n					1.25,000.00	1.25,000.00	1.25,000.00	1	25,000.00	1.25,000.00	4.00	100,000.00	JF Perencanaan
		<i>Koordinasi dan Penyusunan RKA</i>	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA</i>	Do ku					1.25,000.00	1.25,000.00	1.25,000.00	1	25,000.00	1.25,000.00	4.00	100,000.00	JF Perencanaan

		<i>Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	<i>SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	me n						00.0 0		00.0 0		00.0 0		00.0 0		000. 00	
		<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	Do ku me n					1. 0 0	25,0 00,0 00.0 0	1. 0 0	25,0 00,0 00.0 0	1	25,0 00,0 00.0 0	1. 0 0	25,0 00,0 00.0 0	4. 00	100, 000. 00	JF Peren cana

		<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	Do ku me n						1.	25,0	1.	25,0	1	25,0	1.	25,0	4.	100,000.00	JF Perencana
		<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Capaian Kinerja dan</i>	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan</i>	La por an	3	50,0	2.	50,0	3.	100,0	3.	150,0	3	150,000.00	3.	150,000.00	14	600,000.00	JF Perencana	

		<i>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>																	
		<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	La por an	2	2. 0 0	150, 000. 00	1. 00	100, 000. 00	4. 0	139, 583. 00	4. 0	150, 000. 00	4	150, 000. 00	4. 0	150, 000. 00	17 .0 0	689, 583, 539. 00	JF Peren cana
		<i>Pelaksanaan Pengumpulan Data</i>	<i>Jumlah Data Statistik Sektoral</i>	Dat a	2	2. 0 0	600, 000. 00	2. 00	550, 000. 00	2. 0 0	200, 000. 00	2. 0 0	200, 000. 00	2	200, 000. 00	2. 0 0	200, 000. 00	10 .0 0	1,35 0,00	JF Peren cana

		<i>Statistik Sektoral Daerah</i>	<i>Daerah yang Telah Dikumpul kan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah</i>					000. 00		000. 00		000. 00		000. 00		000. 00		0,00 0.00		
		<i>Pelaksana an Forum Perangkat Daerah Berdasark an Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusun an Dokumen Perencana</i>	<i>Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasar kan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka</i>	Ber ita Ac ara	1	1.	50,0 00,0 00.0	1.	50,0 00,0 00.0	1.	50,0 00,0 00.0	1.	50,0 00,0 00.0	1.	50,0 00,0 00.0	1.	50,0 00,0 00.0	5.	250, 000, 000. 00	JF Peren cana

		<i>an Perangkat Daerah</i>	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>																	
		<i>Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah</i>	Do ku me n	1	1. 0 0	50,0 00.0 0	1. 00 00.0 0	50,0 00,0 00.0 0	1. 0 0	50,0 00,0 00.0 0	1. 0 0	50,0 00,0 00.0 0	1	50,0 00,0 00.0 0	1. 0 0	50,0 00,0 00.0 0	5. 00 00	250, 000. 00	JF Peren cana
		<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra</i>	Do ku me n					1. 0 0	50,0 00,0 00.0 0	1. 0 0	50,0 00,0 00.0 0	1	50,0 00,0 00.0 0	1. 0 0	50,0 00,0 00.0 0	4. 00 00	200, 000. 00	JF Peren cana	

		<i>Renstra PD dan Renja PD</i>	<i>Renja PD yang disusun</i>																		
		<i>Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional Melalui Koordinasi Teknis Pembangunan</i>	<i>Jumlah Berita Acara Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional Melalui Koordinasi Teknis</i>	<i>Berita Acara</i>							1		1						4		JF Perencana
									1.	50,0		50,0		50,0	1.	50,0					200,000.00
									0	00,0		00,0		00,0	0	00,0					
									0	00.0		00.0		00.0	0	00.0					
										0		0		0		0					

		Perangkat Daerah				0	11.0		68.0		00.0	0	00.0		00.0	0	00.0		68.0	
						0	0		0		0	0	0		0	0	0		0	
		<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Oran g/ Bulan	12	1	17,0 99,8 66,7 11.0 0		19,1 03,2 65,9 68.0 0	2	18,0 00,0 00,0 00,0 0	2	18,0 00,0 00,0 00,0 0	2	18,0 00,0 00,0 00,0 0	2	18,0 00,0 00,0 00,0 0	81	91,1 03,2 65,9 68.0 0	JF Perencanaan
		<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Dokumen						2.	50,0	2.	50,0	2	50,0	2.	50,0	8.	200, 000, 000. 00	JF Perencanaan
		<i>Pelaksanaan Penatausahaan</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan</i>	Dokumen						2.	50,0	2.	50,0	2	50,0	2.	50,0	8.	200, 000, 000. 00	JF Perencanaan

		haan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	me n						00.0 0		00.0 0		00.0 0		00.0 0		000. 00			
		Koordinasi dan Pelaksana an Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinas i dan Pelaksan aan Akuntansi SKPD	Do ku me n					1. 0	10,0 00,0 00.0 0	1. 0	10,0 00,0 00.0 0	1	10,0 00,0 00.0 0	1. 0	10,0 00,0 00.0 0	4. 00	40,0 00,0 00.0 0	JF Peren cana		
		Koordinasi dan Penyusun an Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinas	La por an	1		25,0		1. 0	00,0 00.0 0	1. 00	25,0 00,0 00.0 0	1. 0	50,0 00,0 00.0 0	1. 0	100, 000, 000. 00	1. 0	100, 000, 000. 00	5. 00	375, 000, 000. 00	JF Peren cana

			<i>i</i> <i>Penyusunan</i> <i>Laporan</i> <i>Keuangan</i> <i>Akhir</i> <i>Tahun</i> <i>SKPD</i>																	
		<i>Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</i>	<i>Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>	Do ku me n					1.	25,0 0 0	2.	50,0 00,0 00.0	2	50,0 00,0 00.0	2.	50,0 00,0 00.0	7.	00	175,000.00	JF Perencana
		<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana</i>	La por an	12	1	377, 520, 000.	12	2.	100, 000, 000.	2.	100, 000, 000.	2	100, 000, 000.	2.	100, 000, 000.	20	0	777,520.000.00	JF Perencana

		<i>Keuangan Bulanan/ Triwulana n/Semeste ran SKPD</i>	<i>n/ Semester an SKPD dan Laporan Koordinas i Penyusun an Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/Semest eran SKPD</i>																	
		<i>Penyusun an Pelaporan dan Analisis Prognosis</i>	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	Do ku me n	1	1. 0 0	25,0 00,0 0	1. 00 00,0 0	25,0 00,0 0	1. 0 0	25,0 00,0 0	1. 0 0	25,0 00,0 0	1. 0 0	25,0 00,0 0	1. 0 0	25,0 00,0 0	5. 00 0	125, 000, 000. 00	JF Peren cana

		<i>Realisasi Anggaran</i>																		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Bulan	21	2	418,440.000.000	16	115,000.000.000	3	285,000.000.000	3	308,640.000.000	6	308,640.000.000	3	280,420.000.000	15	1,297,700,000.000	Kasub Umum Tatalaksana dan Kepegawaian
		<i>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	Do kumen	1	2	30,420,000.000	2	25,000.000.000	2	30,000.000.000	2	30,420,000.000	2	30,420,000.000	2	30,420,000.000	10	146,260,000.000	Kasub Umum Tatalaksana dan Kepegawaian

		<i>Pengaman an Barang Milik Daerah SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Pengama nan Barang Milik Daerah SKPD</i>	Do ku me n						3. 0 0	50,0 00,0 00.0 0	3. 0 0	50,0 00,0 00.0 0	3. 0 0	50,0 00,0 00.0 0	3. 0 0	50,0 00,0 00.0 0	12 .0 0	200, 000. 000. 00	Kasu b Umu m Tatal aksa na dan Kepe gawai an
		<i>Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinas i Penilaian Barang Milik</i>	La por an	1	165, 680, 000. 00	1. 00	50,0 00,0 00.0 0	3. 0 0	50,0 00,0 00.0 0	3. 0 0	50,0 00,0 00.0 0	3. 0 0	50,0 00,0 00.0 0	3. 0 0	50,0 00,0 00.0 0	13 .0 0	250, 000. 000. 00	Kasu b Umu m Tatal aksa na dan Kepe gawai an	

			Daerah SKPD																			
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	La por an						3. 0 0	50,0 00,0 00.0 0	3. 0 0	50,0 00,0 00.0 0	3. 0 0	50,0 00,0 00.0 0	3. 0 0	50,0 00,0 00.0 0	12 .0 0	200, 000. 00	Kasu b Umum Tatal aksana dan Kepegawaian		
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	La por an	1		30,0			1. 0 0	00,0 00.0 0	12 .0 0	30,0 00,0 00.0 0	7. 0 0	30,0 00,0 00.0 0	7. 0 0	30,0 00,0 00.0 0	7. 0 0	30,0 00,0 00.0 0	40 .0 0	150, 000. 00	Kasu b Umum Tatal aksana dan

		<i>Daerah pada SKPD</i>	<i>Milik Daerah pada SKPD</i>																Kepegawaian	
		<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	La por an	12	1 2. 0 0	144, 120, 000. 00			1 2. 0 0	50,0 00,0 0 0	1 2. 0 0	50,0 00,0 0 0	1 2. 0 0	50,0 00,0 0 0	1 2. 0 0	50,0 00,0 0 0	48 .0 0	200, 000. 00	Kasub Umum Tatalaksana dan Kepegawaian
		<i>Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD</i>	Do ku me n	6	6. 0 0	48,2 20,0 000. 0	1. 00	10,0 00,0 0	6. 0 0	25,0 00,0 0	6. 0 0	48,2 20,0 000. 0	6	48,2 20,0 0	2. 0 0	20,0 00,0 00,0 0	21 .0 0	151, 440, 00	Kasub Umum Tatalaksana dan Kepegawaian

																				gawai an
		Administ asi Pendapat an Daerah Kewenang an Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administ rasi Pendapat an Daerah Kewenan gan Perangka t Daerah	Do ku me n	12	1 3 0 0	70,5 20,0 00.0 0	13 .0 0	30,0 00,0 00.0 0	1 3 0 0	35,0 00,0 00.0 0	1 3 0 0	35,0 00,0 00.0 0	3 00,0 00.0 0	35,0 00,0 00.0 0	1 3 0 0	35,0 00,0 00.0 0	65 .0 0	170, 000, 000. 00	Kasu b Umu m Tatal aksa na dan Kepe gawai an
		<i>Perencana an Pengelolaa n Retribusi Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencan aan pengelola an retribusi yang disusun.</i>	Do ku me n		1. 0 0	10,0 00,0 00.0 0	1. 00 0	10,0 00,0 00.0 0	1. 0 0	10,0 00,0 00.0 0	1. 0 0	10,0 00,0 00.0 0	1 00,0 00.0 0	10,0 00,0 00.0 0	1. 0 0	10,0 00,0 00.0 0	5. 00 0	50,0 00,0 00.0 0	Kasu b Umu m Tatal aksa na dan Kepe gawai an

		<i>Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	<i>Jumlah laporan pengelolaan retribusi yang disusun dan disampai kan.</i>	La por an	12	1 2	60,5 20,0 00.0 0	12	20,0 00,0 00.0 0	1 2. 0 0	25,0 00,0 00.0 0	1 2. 0 0	25,0 00,0 00.0 0	1 2. 0 0	25,0 00,0 00.0 0	1 2. 0 0	25,0 00,0 00.0 0	60 .0 0 0	120, 000, 000. 00	Kasu b Umu m Tatal aksa na dan Kepe gawai an
																			-	
		Administra si Kepegawa ian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Do ku me n	21	2 1. 0 0	100, 000, 000. 00 0	21	100, 000, 000. 00 0	2 5 2. 0 0	325, 000, 000. 00 0	2 5 3. 0 0	375, 000, 000. 00 0	2 2 3. 0 0	325, 000, 000. 00 0	2 5 3. 0 0	375, 000, 000. 00 0	1, 03 1. 00	1,50 0,00 0,00 0.00	Kasu b Umu m Tatal aksa na dan Kepe gawai an

		<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	Unit							1.000	50,000.00			1.000	50,000.00	2.00	100,000.00	Kasub Umum Tatalaksana dan Kepegawaian
		<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>	Paket					2200	150,000.00	2200	150,000.00	2200	150,000.00	2200	150,000.00	88%	600,000.00	Kasub Umum Tatalaksana dan Kepegawaian

		<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	Do ku me n						1.	50,0	1.	50,0	1.	50,0	1.	50,0	4.	200,000.00	Kasub Umum Tatalaksana dan Kepegawaian
		<i>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	Do ku me n	1	50,0				1.	25,0	1.	25,0	1.	25,0	1.	25,0	5.	150,000.00	Kasub Umum Tatalaksana dan Kepegawaian
		<i>Pendidikan dan</i>	<i>Jumlah Pegawai</i>	Or						1	50,0	1	50,0	1	50,0	1	50,0	40	200,	Kasub

		<i>Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	<i>Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	an g						0.00,00	0.00,00	0.00,00	0.00,00	0.00,00	0.00,00	0.00,00	0.00,00	0.00,00	0.00,00	000,000.00	Umu m Tatalaksa na dan Kepe gawai an
		<i>Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundangan</i>	Or an g					100.000.00	25,000.00	100.000.00	25,000.00	100.000.00	25,000.00	100.000.00	25,000.00	40.000.00	100,000.00	Kasu b Umu m Tatalaksa na dan Kepe gawai an		
		<i>Bimbingan Teknis Implementasi</i>	<i>Jumlah Orang yang</i>	Or	20	20	50,000.00	20	50,000.00	100.000.00	25,000.00	100.000.00	25,000.00	100.000.00	25,000.00	100.000.00	25,000.00	60.000.00	150,000.00	Kasu b Umu	

		<i>asi Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	an g		0	00.0	.0	00.0	0	00.0	0	00.0	0	00.0	0	00.0	.0	000.00	m Tatalaksana dan Kepegawaian	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Do kumen	57	5	1,22	2,26	53	850,000.00	6	790,000.00	6	790,000.00	6	790,000.00	6	790,000.00	30	4,010,000.00	Kasub Umum Tatalaksana dan Kepegawaian
		<i>Penyediaan</i>	<i>Jumlah Paket Komponen</i>	Pa ket							1.	50,000,0	1.	50,000,0	1.	50,000,0	1.	50,000,0	4.00	200,000.00	Kasub Umum

		<i>Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor</i>	<i>n Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>							0	00.0	0	00.0	0	00.0	0	00.0		000.00	m Tatalaksana dan Kepegawaian
		<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	Pa ket	2	2.	359,769.00	4.	200,000.00	1.	100,000.00	1.	100,000.00	1.	100,000.00	1.	100,000.00	8.	600,000.00	Kasub Umum Tatalaksana dan Kepegawaian
		<i>Penyediaan Peralatan</i>	<i>Jumlah Paket dan Perlengkapan Rumah</i>	Pa ket						4.	50,000,00	4.	50,000,00	4.	50,000,00	4.	50,000,00	16	200,000.00	Kasub Umum

		Rumah Tangga	Tangga yang Disediakan								00.00		00.00		00.00		00.00		000.00	Tatalaksana dan Kepegawaian
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	250,000.00	2	200,000.00	4.00	100,000.00	4.00	100,000.00	4.00	100,000.00	4.00	100,000.00	18.00	600,000.00	Kasub Umum Tatalaksana dan Kepegawaian
		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda	Paket	2	2	200,000.00	5	200,000.00	5.00	150,000.00	5.00	150,000.00	5.00	150,000.00	5.00	150,000.00	25.00	800,000.00	Kasub Umum Tatalaksana

		<i>Penggunaan</i>	<i>aan yang Disediakan</i>																na dan Kepegawaian
		<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan</i>	Do ku me n					1. 0 0	25,0 00,0 00.0 0	1. 0 0	25,0 00,0 00.0 0	1. 0 0	25,0 00,0 00.0 0	1. 0 0	25,0 00,0 00.0 0	4. 00	100,000.00	Kasub Umum Tatalaksana dan Kepegawaian
		<i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	La por an					3	15,0 00,0 00.0 0	3	15,0 00,0 00.0 0	3	15,0 00,0 00.0 0	3	15,0 00,0 00.0 0	12	60,000.00	Kasub Umum Tatalaksana

																				dan Kepegawaian
		<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Laporan	40	4	300,000.00	40	200,000.00	4	200,000.00	4	200,000.00	4	200,000.00	4	200,000.00	20	1,000,000.00	Kasub Umum Tatalaksana dan Kepegawaian
		<i>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	Dokumen	1	1	112,500.00	2	50,000.00	2	50,000.00	2	50,000.00	2	50,000.00	2	50,000.00	10	250,000.00	Kasub Umum Tatalaksana dan Kepegawaian

																				gawai an
		<i>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	Do ku me n					1	50,0 00,0 00.0 0	1	50,0 00,0 00.0 0	1	50,0 00,0 00.0 0	1	50,0 00,0 00.0 0	4	200, 000, 000. 00	Kasu b Umum Tatal aksana dan Kepegawai an	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan	La por an					1 1	800, 000, 000. 00	7	150, 000, 000. 00	9	250, 000, 000. 00	7	150, 000, 000. 00	34	1,35 0,00 0,00 0,00	Kasu b Umum Tatal aksana dan Kepe	

																				gawai an
		<i>Pengadaa n Kendaraa n Peroranga n Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Unit Kendaraa n Peroranga n Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Disediaka n</i>	Unit					1	50,0 00,0 00.0 0							1	50,0 00,0 00.0 0	Kasu b Umu m Tatal aksa na dan Kepe gawai an	
		<i>Pengadaa n Kendaraa n Dinas Operasion al atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Unit Kendaraa n Dinas Operasion al atau Lapangan yang</i>	Unit					1	500, 000, 000. 00							1	500, 000, 000. 00	Kasu b Umu m Tatal aksa na dan Kepe	

			<i>Disediakan</i>																gawai an
		<i>Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor</i>	<i>Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan</i>	Unit					2	100,000.00			2	100,000.00			4	200,000.00	Kasub Umum Tatalaksana dan Kepegawaian
		<i>Pengadaan Mebel</i>	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	Paket					2	100,000.00	2	100,000.00	2	100,000.00	2	100,000.00	8	400,000.00	Kasub Umum Tatalaksana dan Kepegawaian

		<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	Unit						5	50,000.00	5	50,000.00	5	50,000.00	5	50,000.00	20	200,000.00	Kasub Umum Tatalaksana dan Kepegawaian
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan	Bulan	24	24	2,749,492.00	12	850,000.00	27	1,020,000.00	27	1,020,000.00	27	1,020,000.00	27	1,020,000.00	12	4,930,000.00	Kasub Umum Tatalaksana dan Kepegawaian

		<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	La por an	12	1 2	1,07 5,43 4,00 0.00	12	850, 000, 000. 00	1 2	850, 000, 000. 00	1 2	850, 000, 000. 00	1 2	850, 000, 000. 00	1 2	850, 000, 000. 00	60	4,25 0,00 0,00 0,00	Kasub Umum Tatalaksana dan Kepegawaian
		<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang</i>	La por an					3		3		3		3		3	12	200, 000, 000. 00	Kasub Umum Tatalaksana dan Kepegawaian

			<i>Disediakan</i>																	
		<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>Laporan</i>	12	1 2	1,67 4,06 2,71 2.00			1 2	1 120, 2 000, 000. 00	1 2 120, 2 000, 000. 00	1 2 120, 2 000, 000. 00	1 2 120, 2 000, 000. 00	1 2 120, 2 000, 000. 00	1 2 120, 2 000, 000. 00	48	480, 000, 000. 00	Kasub Umum Tatalaksana dan Kepegawaian	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan	Bulan	22 9	2 2 9	861, 980, 000. 00	2 4 8	601, 550, 000. 00	2 4 9	600, 000, 000. 00	2 4 9	600, 000, 000. 00	2 4 9	600, 000, 000. 00	2 4 9	600, 000, 000. 00	1 2 4	3,00 1,55 0,00 0.00	Kasub Umum Tatalaksana dan Kepegawaian

		<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	Unit	47	47	343,740,000.00	47	277,000.00	47	200,000.00	47	200,000.00	47	200,000.00	47	200,000.00	235	1,077,000.00	Kasub Umum Tatalaksana dan Kepegawaian
		<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak</i>	<i>Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang Dipelihara</i>	Unit	9	9	371,120,000.00	28	175,000.00	28	200,000.00	28	200,000.00	28	200,000.00	28	200,000.00	140	975,000.00	Kasub Umum Tatalaksana dan

		<i>Perizinan Kendaraa n Dinas Operasion al atau Lapangan</i>	<i>dan Dibayark an Pajak dan Perizinan nya</i>																	Kepe gawai an
		<i>Pemelihar aan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	Uni t	173	1 7 3	147, 120, 00	17 3	149, 550, 00	1 7 3	1 00, 000, 00	1 7 3	1 00, 000, 00	1 7 3	1 00, 000, 00	1 7 3	1 00, 000, 00	86 5	549, 550, 000. 00	Kasu b Umu m Tatal aksa na dan Kepe gawai an
		<i>Pemelihar aan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Kantor dan</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Banguna n Lainnya yang</i>	Uni t						1	1 00, 000, 00	1	1 00, 000, 00	1	1 00, 000, 00	1	1 00, 000, 00	4	400, 000, 000. 00	Kasu b Umu m Tatal aksa na

		Bangunan Lainnya	Dipelihara /Direhabilitasi																	dan Kepe gawai an
	Me nin gka tny a kun jun gan jum lah wis ata wan ; (WI SM AN, WIS NU S)	PROGRA M PENINGK ATAN DAYA TARIK DESTINA SI PARIWISA TA	Presesnt ase Pertumb uhan Kunjunga n Wisatawa n	Per se n	0.8	1. 4	16,2 76,8 94,0 00.0 0	1. 5	15,7 20,2 43,1 68.0 0	1. 6	15,6 50,0 00.0 0	1. 7	15,0 09,3 04,5 40.0 0	1. 8	11,2 50,0 00.0 0	1. 9	12,0 00,0 00,0 00.0 0	1. 9	69,6 29,5 47,7 08.0 0	KEPA LA BIDA NG BIDA NG PEN GEM BAN GAN DEST INASI DAN USA HA PARI WISA TA

		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata yang dikelola	Do kumen	7	0	0.00	2	7,12	2	5,15	1	5,00	1	-	2	200,000.00	8	17,475,000.00	ADIYATA MA KEPARIWISANTAN DAN EKONOMI KREATIF
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan	Lokasi	7				5,200,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00					2	15,200,000.00	ADIYATA KEPARIWISANTAN DAN EKONOMI

		Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemanfaatan, Revitalisasi)																KREATIF
		Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Tarik Unggulan Kabupaten/Kota	Lokasi	0				1	150,000.00	0	-	0	-	1	200,000.00	2	350,000.00	ADIYATAMA KEPA RIWISATAN DAN EKONOMI KREATIF

		Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Do ku me n	0			4	1,92	0	-	0	-	0	-	0	-	4	1,92	ADIY ATA MA KEPA RIWI SATA AN DAN EKO NOMI KRE ATIF
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata yang dikelola Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan strategis pariwisata yang dikelola	Do ku me n	2	2	9,45	2	5,34	4	5,75	3	5,30	3	6,55	2	6,20	1	29,1	ADIY ATA MA KEP ARI WISA TAA N DAN EKO
							0,00		5,24		0,00		9,30		0,00		0,00	4	54,5	
							0,00		3,16		0,00		4,54		0,00		0,00		47,7	
							0.00		8.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08.0	

																				NOM I KRE ATIF
		<i>Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten /Kota</i>	<i>Tersedian ya Dokumen Penetapa n Kawasan Strategis Pariwisat a Kabupate n/Kota</i>	Do ku me n	0		1	75,0 00,0 00.0 0	0	-	2	300, 000, 000. 00	0	-	0	-	3	375, 000, 000. 00	ADITYA MA KEPARI WISATA AN DAN EKO NOMI KRE ATIF	
		<i>Perencana an Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten /Kota</i>	<i>Tersedian ya Dokumen Perencan aan Kawasan Strategis Pariwisat</i>	Do ku me n	2	2	550, 000, 000. 00		1	350, 000, 000. 00	0	-	1	350, 000, 000. 00	0	-	2	700, 000, 000. 00	ADITYA MA KEPARI WISATA AN DAN	

			<i>a</i> <i>Kabupaten/Kota</i>																	EKO NOMI KRE ATIF
		<i>Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpeliharaan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	Unit	9	9	8,90	6		1		1		1		1		10		ADIY ATA MA KEPA RIWI SATA AN DAN EKO NOMI KRE ATIF
		<i>Penerapan Destinasi Pariwisata</i>	<i>Jumlah Lokasi yang</i>	Lokasi	0					1		0	-	0	-	0	-	1		ADIY ATA MA
											300,000,								300,000,	

		<i>Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten /Kota</i>	<i>Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>							000. 00								000. 00	KEPA RIWI SATA AN DAN EKO NOMI KRE ATIF
		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota	Orang	0				1 5	100, 000, 000. 00	3 0	200, 000, 000. 00	3 0	200, 000, 000. 00	3 0	200, 000, 000. 00	10 5	700, 000, 000. 00	ADIY ATA MA KEPA RIWI SATA AN DAN

		Kabupaten/Kota	yang dikembangkan																	EKONOMIKREATIF	
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupate n/Kota	Jumlah Pengadaa n dan Pemeliha raan Sarana dan prasaran a yang dikelola	Do ku me n	2	3	5,67	2	3,02	4	4,05	3	3,90	3	3,90	5	4,80	1	7	19,6	ATA
							6,89		5,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	75,0	MA
							4,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	00,0	KEP
							0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	00.0	ARI
																				0	WISA
																					TAA
																					N
																					DAN
																					EKO
																					NOM
																					I
																					KRE
																					ATIF
		<i>Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupate n/Kota</i>	<i>Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupate n/Kota</i>	<i>Lo kas i</i>	<i>0</i>					<i>1</i>		<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>2</i>		<i>3</i>		450,000.00	ATA
											<i>150,000.00</i>						<i>300,000.00</i>			000.00	MA
																					KEPA
																					RIWI
																					SATA

			<i>yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemanfaatan, Revitalisasi)</i>																	AN DAN EKO NOMI KRE ATIF
		<i>Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelola Destinasi Pariwisata</i>	Unit	0	7	3,37	8		4		4		4		4		24		ADIY ATA MA KEPA RIWI SATA AN DAN EKO
							6,89		2,35		3,00		3,00		3,00		3,00		14,3	
							4,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,0	
							0.00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		00,0	
								0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			00.0	
																			0	

		<i>n</i> <i>Destinasi</i> <i>Pariwisata</i> <i>Kabupaten</i> <i>/Kota</i>	<i>a</i> <i>Kabupate</i> <i>n/Kota</i> <i>yang</i> <i>Tersedia</i> <i>dan</i> <i>Terpelihar</i> <i>a</i>																	NOMI KRE ATIF
		<i>Pemberda</i> <i>yaan</i> <i>Masyarak</i> <i>at dalam</i> <i>pengelolaa</i> <i>n</i> <i>Destinasi</i> <i>Pariwisata</i> <i>Kabupaten</i> <i>/Kota</i>	<i>Jumlah</i> <i>Laporan</i> <i>Hasil</i> <i>Pemberda</i> <i>yaan</i> <i>Masyarak</i> <i>at dalam</i> <i>Pengelola</i> <i>an</i> <i>Destinasi</i> <i>Pariwisat</i> <i>a</i> <i>Kabupate</i> <i>n/Kota</i>	La por an	10	6	2,30 0,00 0,00 0.00	15	575, 000, 000. 00	1 0	500, 000, 000. 00	1 0	500, 000, 000. 00	1 0	500, 000, 000. 00	1 0	500, 000, 000. 00	55	2,57 5,00 0,00 0,00	ADIY ATA MA KEPA RIWI SATA AN DAN EKO NOMI KRE ATIF
		<i>Penerapan</i> <i>Destinasi</i>	<i>Jumlah</i> <i>Lokasi</i>	De sti				3	-	3	300,	3	300,	3	300,	3	300,	15	1,20	ADIY ATA

		<i>Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	<i>yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	nas i Par iwi sat a						000, 000. 00		000, 000. 00		000, 000. 00		000, 000. 00		0,00 0,00 0,00	MA KEPA RIWI SATA AN DAN EKO NOMI KRE ATIF	
		<i>Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata</i>	<i>Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata</i>	Do ku me n	1				0	-	0	-	0	-	1		600, 000, 000. 00	1	600, 000, 000. 00	ADIY ATA MA KEPA RIWI SATA AN DAN

		<i>Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Daerah Kab/Kota</i>																	EKO NOMI KRE ATIF	
		<i>Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota</i>	<i>La por an</i>			1	100,000.00	1	100,000.00	1	100,000.00	1	100,000.00	1	100,000.00	5	500,000.00		ADIY ATA MA KEPA RIWI SATA AN DAN EKO NOMI KRE ATIF	
		<i>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah</i>	<i>Jumlah Usaha Pariwisata yang direkomendasikan untuk</i>	<i>Do ku me n</i>	1	2	1,15	3	225,000.00	4	700,000.00	5	800,000.00	5	800,000.00	5	800,000.00	2	2	3,325,000.00	ADIY ATA MA KEP ARI WISA TAA

		Kabupaten/Kota	mendapat TDUP																N DAN EKO NOM I KRE ATIF
		Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI9042:2	Jumlah usaha pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE yang dibangun dan diawasi	Usaha Pariwisata	0		10	50,000.00	5	150,000.00	5	150,000.00	5	150,000.00	5	150,000.00	30	650,000.00	ADITYAMA KEPA RIWISATAN DAN EKONOMI KREATIF

		021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota																	
		Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota	Jumlah usaha yang dibangun dan diawasi	Usaha	0	4	650,000,000			15	15	15	15	15	15	15	60	600,000,000	ADIYATA KEPA RIWI SATA AN DAN EKO NOMI KRE ATIF

		Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupate n Kota	Jumlah usaha pariwisat a dan ekonomi kreatif yang difasilitas i sertifikasi SNI 9042:202 1	Us ah a	1		10	125, 000, 000. 00	5	150, 000, 000. 00	5	150, 000, 000. 00	5	150, 000, 000. 00	5	150, 000, 000. 00	30	725, 000, 000. 00	ADIY ATA MA KEPA RIWI SATA AN DAN EKO NOMI KRE ATIF		
		Penyediaa n Layanan Konsultasi Pendaftar an Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultas i Pendaftar an Perizinan Berusaha Sektor	Do ku me n	0	1	500, 000, 000. 00	25	50,0 00,0 00.0 0	2	5	150, 000, 000. 00	2	5	150, 000, 000. 00	2	5	150, 000, 000. 00	12	650, 000, 000. 00	ADIY ATA MA KEPA RIWI SATA AN DAN EKO NOMI

		Di Tingkat Kab/Kota	Pariwisata tingkat Kab/Kota																KREATIF
		Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	Unit Usaha	0				1	100,000.00	2	200,000.00	2	200,000.00	2	200,000.00	7	700,000.00	DIY ATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF

Me nin gka tny a kun jun gan jum lah wis ata wan ; (WI SM AN, WIS NU S)	PROGRA M PEMASAR AN PARIWISA TA	Presenta se Peningka tan Akses Terhadap Media Pemasara n Pariwisat a	Per se n	0%	5	9,85	7	6,57	9	2,52	1	3,67	1	3,67	1	4,59	1	21,0	49,8	69,4	54,0	KEPA LA BIDA NG PEM ASAR AN PARI WISA TA
	<i>Pemasara n Pariwisat a Dalam</i>	Jumlah pemasara n Pariwisat	Do ku me n	4	4	9,85	4	6,57	4	2,52	4	3,67	4	3,67	4	4,59	2	21,0	49,8	69,4	0	ADIY ATA MA KEP

		dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	a Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata a															54.00	ARI WISATAAN DAN EKONOMI KREATIF
		<i>Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata</i>	Do ku me n	4	1	50,000.00	2	1	1	1	1	1	1	1	1	6	750,000.00	ADIY ATA MA KEPA RIWI SATA AN DAN EKO NOMI KRE ATIF

			<i>a</i> <i>Kabupaten/Kota,</i> <i>Baik</i> <i>Dalam</i> <i>dan Luar</i> <i>Negeri</i>																
		1. <i>Penyediaan</i> <i>Data</i> <i>dan</i> <i>Dokumentasi</i> <i>Event</i> <i>Daerah</i> <i>Rp.</i> <i>100.000.000</i>																	-
		2. <i>Penyebaran</i> <i>Informasi</i> <i>melalui</i> <i>Tourism</i> <i>Information</i>																	

		<i>n Center (TIC) Jam Bentong (Revitalisa si dan Pemenuha n/peremaj aan Perlengka pan TIC) Rp. 300.000.0 00 3. Penyebara n Informasi melalui Dayak Experience Center (DEC) Pulau Kumala</i>																	
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<i>(Revitalisasi dan Pemenuhan/ peremajaan Perlengkapan DEC Rp. 300.000.000 4. Pemeliharaan dan Upgrade Website Sistem Kepariwisataaan Daerah (SISPARD A) Rp. 250.000.000</i>																	
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		5. <i>Penyebaran Informasi Pariwisata Melalui Potcast Outdoor / Indoor Rp. 250.000.000</i>																		
		<i>Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri</i>	<i>Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri</i>	<i>Dokumen</i>	3	3	650,000.00	4	600,000.00	2	300,000.00	2	300,000.00	2	300,000.00	2	300,000.00	12	1,800,000.00	ADIY ATA MA KEPA RIWI SATA AN DAN EKO NOMI KRE ATIF

		<i>Negeri Rp.</i> <i>200.000.0</i> <i>00</i> <i>3.</i> <i>Kerjasama</i> <i>dengan</i> <i>HPI dalam</i> <i>Promosi</i> <i>Paket</i> <i>Wisata</i> <i>Komunias</i> <i>Rp.</i> <i>100.000.0</i> <i>00</i> <i>4.</i> <i>Kerjasama</i> <i>dengan</i> <i>ADWINDO</i> <i>dalam</i> <i>Pemilihan</i> <i>Duta</i> <i>Wisata Rp.</i> <i>400.000.0</i> <i>00</i>																	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<i>Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten /Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	La por an	12	1 1	6,50 0,00 0,00 0.00	10		4		9		9		9			3,57 4,86 9,45 4.00	14,9 99,8 69,4 54.0 0	ADIY ATA MA KEPA RIWI SATA AN DAN EKO NOMI KRE ATIF
		<i>1. Fasilitasi Pemasaran Melalui kegiatan Kukar Travel Road Show bersama</i>																		-	ADIY ATA MA KEPA RIWI SATA AN DAN EKO NOMI

		<i>Keraton Kutai Kartanega ra dan SIPA Solo Rp. 350.000.0 00 3. Fasilitasi Event Promosi "Festival Danau Semayang " bekerjasa ma dengan Pokdarwis B3 Desa Wisata Pela Rp. 300.000.0</i>																	
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		00																	
		4.																	
		<i>Fasilitasi</i>																	
		<i>Event</i>																	
		<i>Promosi</i>																	
		<i>"Eroh</i>																	
		<i>Bebaya"</i>																	
		<i>bekerjasa</i>																	
		<i>ma</i>																	
		<i>dengan</i>																	
		<i>IPM Kukar</i>																	
		<i>di</i>																	
		<i>Yogyakarta</i>																	
		<i>a Rp.</i>																	
		<i>200.000.0</i>																	
		<i>00</i>																	
		5.																	
		<i>Fasilitasi</i>																	
		<i>Event</i>																	
		<i>Promosi</i>																	
		<i>"Petjoh</i>																	
		<i>Keroan</i>																	
		<i>Makassar"</i>																	
		<i>bekerjasa</i>																	

		<i>ma dengan KPMKK Kota Makassar Rp. 200.000.0 00 6. Fasilitasi Event Promosi "Etam Begenjoh" bekerjasa ma dengan KPMKK Kota Malang Rp. 200.000.0 00 7.</i>																	
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<i>Fasilitasi Pemasaran Pariwisata Jaringan bisnis (B2B dan B2C) melalui business matching, table top, atau pertemuan langsung dengan tour operator di Luar Daerah dan Luar Negeri Rp.1.000. 000.000</i>																	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		8. <i>Fasilitasi Kegiatan Pemasara n APKASI EXPO Rp. 100.000.0 00</i>																	
		9. <i>Fasilitasi Kegiatan Pemasara n Luar Negeri Melalui Event Internation al Mask Festival (IMF) Rp. 100.000.0 00</i>																	
		10. <i>Fasilitasi</i>																	

		<i>Kegiatan Pemasaran Luar Daerah Tourism Expo Rp. 200.000.000</i>																				
		<i>Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata</i>	<i>Dokumen</i>					1	100,000.00	1	100,000.00	1	100,000.00	1	100,000.00	4	400,000.00				
		<i>Penguatan Promosi Melalui Media</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan</i>	<i>Dokumen</i>	8	10	2,650,000.00	7	1,100,000.00	4	500,000.00	4	500,000.00	4	500,000.00	4	500,000.00	3,100,000.00	ADIY	ATA	MA	KEPA

		Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	n Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik , dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri					0,00 0.00		000. 00		000. 00		000. 00		000. 00		0,00 0.00	RIWI SATA AN DAN EKO NOMI KRE ATIF	
Me nin gka tny a nila i tam bah fasi lita s	PROGRA M PENGEMB ANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFA ATAN DAN PERLIND UNGAN	Presenta se Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaa n Intelektu al	Per se n	0.4 79 %	0. 7 0 7 %	3,80 0,00 0,00 %	0. 8 1 5 %	13,6 50,0 00,0 00.0 0 %	0. 9 2 4 %	16,1 75,0 00,0 00.0 0 %	1. 0 2 5 %	17,6 75,0 00,0 00.0 0 %	1. 1 2 5 %	18,1 75,0 00,0 00.0 0 %	1. 2 2 2 %	18,1 75,0 00,0 00.0 0 %	1. 2 2 2 %	1. 2 2 2 %	83,8 50,0 00,0 00.0 0	KEPA LA BIDA NG BIDA NG PEN GEM BAN GAN EKO NOMI

	pen duk ung sek tor pari wisata	HAK KEKAYAA N INTELEK TUAL																		KRE ATIF
		<i>Penyedia an Prasara na (Zona kreatif/R uang Kreatif/K ota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspr esi, Berpromo si dan Berintera</i>	Jumlah Prasaran a Yang Tersedia	Do ku me n	10 0% 0 %	0. 0 %	0.00	4 7. 7 4 %	4,75 0,00 0,00 0,00	1 3. 0 7 %	1,30 0,00 0,00 0,00	1 3. 0 7 %	1,30 0,00 0,00 0,00	1 3. 0 7 %	1,30 0,00 0,00 0,00	1 3. 0 7 %	1,30 0,00 0,00 0,00	1 0 0 0 %	9,95 0,00 0,00 0,00	ADIY ATA MA KEP ARI WISA TAA N DAN EKO NOM I KRE ATIF

		ksi Bagi Insan Kreatif Di Daerah Kabupaten/Kota																		
		Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Unit				1	4,75	1	1,30	1	1,30	1	1,30	1	1,30	5		ADIY ATA MA KEPA RIWI SATA AN DAN EKO NOMI KRE ATIF
		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Ekosistem Ekonomi Kreatif yang	Do ku me n	10 0.0 0%	5. 1 4 %	3,80 0,00 0,00 0.00	1 2. 0 4 %	8,90 0,00 0,00 0.00	2 0. 1 3 %	14,8 75,0 00,0 00.0 0	2 2. 1 6 %	16,3 75,0 00,0 00.0 0	2 2. 8 3 %	16,8 75,0 00,0 00.0 0	2 2. 8 3 %	16,8 75,0 00,0 00.0 0	1 0 0 0 %	73,9 00,0 00,0 00.0 0	ADIY ATA MA KEP ARI WISA

			dikemba ngkan																TAA N DAN EKO NOM I KRE ATIF	
		<i>Fasilitasi Pendanaa n dan Pembiaya an</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaa n dan Pembiaya an bagi Pelaku Ekonomi Kreatif</i>	La por an	1	1	100, 000, 000.	1	100, 000, 000.	1	75,0 00,0 00.0	1	75,0 00,0 00.0	1	75,0 00,0 00.0	1	75,0 00,0 00.0	5	400, 000, 000. 00	ADITYA MA KEPA RIWI SATA AN DAN EKO NOMI KRE ATIF
		<i>Penyusun an Rencana Aksi</i>	<i>Jumlah Dokumen Rencana Aksi</i>	Do ku me n					1	50,0 00,0	1	50,0 00,0	1	50,0 00,0	1	50,0 00,0	4	200, 000,	ADITYA MA KEPA	

		<i>Pengembangan Ekonomi Kreatif</i>	<i>Pengembangan Ekonomi Kreatif</i>							00.00		00.00		00.00		00.00		000.00	RIWISATAN DAN EKONOMI KREATIF
		<i>Fasilitasi pemberian insentif</i>	<i>Jumlah Insentif yang Diberikan</i>	Pelaku Usaha			10	-	10	1,000,000.00	10	1,000,000.00	10	1,000,000.00	10	1,000,000.00	50	4,000.00	ADIYATAMA KEPARIWISATAN DAN EKONOMI KREATIF
		<i>Penguatan Kelembagaan Ekonomi</i>	<i>Jumlah lembaga / asosiasi yang</i>	Lembaga		8	1,000,000.00		1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	4	400,000.00	ADIYATAMA KEPARIWISATAN DAN EKONOMI KREATIF

		<i>Kreatif Daerah</i>	<i>mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah</i>							000. 00		000. 00		000. 00		000. 00		000. 00	RIWI SATA AN DAN EKO NOMI KRE ATIF
		<i>Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)</i>	<i>Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan bantuan pemerintah</i>	Pelaku Usaha		1 5	500, 000, 000. 00											-	
		<i>Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual</i>	<i>Jumlah kegiatan / orang yang</i>	Kegiatan	10		2	200, 000,	2	2,00 0,00	2	2,00 0,00	2	2,00 0,00	2	2,00 0,00	10	8,20 0,00	ADIY ATA MA KEPA

			<i>mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual</i>						000.00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	RIWI SATA AN DAN EKO NOMI KRE ATIF
		<i>Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual</i>	Do ku me n		5	1,50	6		3	1,47	3		3		3		18	20,000,000	ADIY ATA MA KEPA RIWI SATA AN DAN EKO NOMI KRE ATIF
		<i>Penyusunan</i>	<i>Jumlah dokumen</i>	Do ku		1	250,000,												-	

		<i>Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah</i>	<i>strategis bidang ekonomi kreatif daerah</i>	men			000.00																		
		<i>Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif</i>	<i>Jumlah terlaksana pendudukan pemasaran ekonomi kreatif</i>	Pro mo si				20	-	2	0	10,000,000.00	2	0	10,000,000.00	2	0	10,000,000.00	2	0	10,000,000.00	10	0	40,000,000.00	ADIY ATA MA KEPA RIWI SATA AN DAN EKO NOMI KRE ATIF
		<i>Penyusunan Skema Insentif Daerah</i>	<i>Tersedianya skema insentif ekonomi kreatif</i>	Do ku me n		1	150,000,000.00														1	-		ADIY ATA MA KEPA RIWI SATA	

																			AN DAN EKO NOMI KRE ATIF	
		<i>Formulasi Kebijakan Pengemba ngan Ekonomi Kreatif Daerah</i>	<i>Jumlah Formulasi Kebijakan untuk menduku ng pengemba ngan ekonomi kreatif daerah</i>	Ke bij ak an		1	150, 000, 000. 00	1	-									1	-	ADIY ATA MA KEPA RIWI SATA AN DAN EKO NOMI KRE ATIF
		<i>Monitoring dan Evaluasi Pengemba ngan Ekosistem</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Monitorin g dan Evaluasi</i>	Do ku me n		2 0	150, 000, 000. 00			1	75,0 00,0 00.0 0	1	75,0 00,0 00.0 0	1	75,0 00,0 00.0 0	1	75,0 00,0 00.0 0	4	300, 000, 000. 00	ADIY ATA MA KEPA RIWI SATA

		<i>Ekonomi Kreatif</i>	<i>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</i>																AN DAN EKONOMI KREATIF
		<i>Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual</i>	<i>Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaa</i>	Pro du k					5	100,000.00	5	100,000.00	5	100,000.00	5	100,000.00	20	400,000.00	ADIYATA KEPA RIWISATAN DAN EKONOMI KREATIF

			<i>tan Kekayaan Intelektua l kepada Pelaku Ekonomi Kreatif</i>																		
	Me nin gka tny a nila i tam bah fasi lita s pen dud uk sek tor	PROGRA M PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA PARIWISA TA DAN EKONOMI KREATIF	Presenta se Pelaku Pariwisat a dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalida si	Per se n	60 %	6 5	3,20 0,00 0,00	7 0 0,00	3,00 0,00 0,00	7 5	1,58 5,00 0,00	8 0 0,00	1,58 5,00 0,00	8 5	3,09 0,00 0,00	9 0 0,00	4,11 0,00 0,00	9 0 0,00	13,3 70,0 00,0 00.0 0	KEPA LA BIDA NG BIDA NG PEN GEM BAN GAN SDM PARI WISA TA DAN EKO NOMI	

	pari wis ata																			KRE ATIF
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM dan Ekraf yang dilaksanakan	Do ku me n	5	4	2,70 0,00 0,00 0.00	5	2,05 0,00 0,00 0.00	6	1,20 0,00 0,00 0.00	6	1,20 0,00 0,00 0.00	6	2,13 0,00 0,00 0.00	6	3,15 0,00 0,00 0.00	2 9 0,00 0,00 0.00	9,73 0,00 0,00 0.00	ADIY ATA MA KEP ARI WISA TAA N DAN EKO NOM I KRE ATIF
		<i>Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konser</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi,</i>	<i>La por an</i>	<i>3</i>			<i>1</i>	<i>500, 000, 000. 00</i>	<i>1</i>	<i>250, 000, 000. 00</i>	<i>1</i>	<i>250, 000, 000. 00</i>	<i>1</i>	<i>500, 000, 000. 00</i>	<i>1</i>	<i>500, 000, 000. 00</i>	<i>5</i>	<i>2,00 0,00 0,00 0.00</i>	<i>ADIY ATA MA KEPA RIWI SATA AN</i>

		<i>vasi Ekonomi Kreatif</i>	<i>Distribusi Konsumsi , dan Konserva si Ekonomi Kreatif</i>																	DAN EKO NOMI KRE ATIF
		<i>Fasilitasi Pengemba ngan Kompeten si Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</i>	<i>Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengemba ngan Kompeten si Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</i>	Or an g	205	1 2 5	1,20 0,00 0,00	18 9	750, 000, 000. 00	9 4	375, 000, 000. 00	9 4	375, 000, 000. 00	1 8 9	2 5 2	1,00 0,00 0,00	81 8	3,25 0,00 0,00 0,00	ADIY ATA MA KEPA RIWI SATA AN DAN EKO NOMI KRE ATIF	

		<i>Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI</i>	<i>Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI</i>	Oran g	200	4	400,000.00	50		5	250,000.00	5	250,000.00	2	500,000.00	4	1,000.00	75	2,250,000.00	ADIYATA MA KEPA RIWI SATA AN DAN EKO NOMI KRE ATIF
		<i>Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata</i>	<i>Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan</i>	Oran g	60	2	100,000.00			3	150,000.00	3	150,000.00	3	150,000.00	6	300,000.00	15	750,000.00	ADIYATA MA KEPA RIWI SATA AN DAN EKO NOMI KRE ATIF

			<i>ngan Pariwisat a</i>																			
		<i>Fasilitasi Sertifikasi Kompeten si bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompeten si bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisat a</i>	<i>Or an g</i>	226	1 0 0	1,00 0,00 0,00	50	3 0	3 0	3 0	3 0	6 0	20 0							ADIY ATA MA KEPA RIWI SATA AN DAN EKO NOMI KRE ATIF	
		<i>Monitoring dan Evaluasi Pengemba ngan Sumber Daya Pariwisata</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Monitorin g danEvalu asi Pengemba</i>	<i>La por an</i>	0			1	1	1	1	1	1	5							350, 000, 000. 00	ADIY ATA MA KEPA RIWI SATA AN DAN

		<i>dan Ekonomi Kreatif</i>	<i>nganSum ber Daya Pariwisat a dan Ekonomi Kreatif</i>																	EKO NOMI KRE ATIF
		Pengemba ngan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekraf yang dikemba ngkan	Or an g	30	1	500, 000, 000. 00	4	950, 000, 000. 00	3	385, 000, 000. 00	3	385, 000, 000. 00	3	960, 000, 000. 00	3	960, 000, 000. 00	1 6	3,64 0,00 0,00 0.00	ADIY ATA MA KEP ARI WISA TAA N DAN EKO NOM I KRE ATIF
		<i>Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti</i>	<i>Or an g</i>	<i>30</i>	<i>9 0</i>	<i>500, 000, 000. 00</i>	<i>50</i>	<i>250, 000, 000. 00</i>	<i>3 0</i>	<i>125, 000, 000. 00</i>	<i>3 0</i>	<i>125, 000, 000. 00</i>	<i>6 0</i>	<i>250, 000, 000. 00</i>	<i>6 0</i>	<i>250, 000, 000. 00</i>	<i>23 0</i>	1,00 0,00	<i>ADIY ATA MA KEPA</i>

		<i>Pendampingan Ekonomi Kreatif</i>	<i>Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif</i>					000.00		000.00		000.00		000.00		000.00		0,00 0,00	RIWI SATA AN DAN EKO NOMI KRE ATIF
		<i>Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha</i>	La por an	0		1	150,000.00	1	150,000.00	1	150,000.00	4	500,000.00	4	500,000.00	11	1,45 0,00 0,00 0,00	ADIY ATA MA KEPA RIWI SATA AN DAN EKO NOMI KRE ATIF
		<i>Pelatihan Asesor Kompeten</i>	<i>Jumlah Orang yang</i>	Or an g	0		40	300,000,	0	-	0	-	0	-	0	-	40	300, 000,	ADIY ATA MA

		<i>si/ Workpl ace Assessor(WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif</i>	<i>Mengikuti Pelatihan Asesor Kompeten si/ Workpl ace Assessor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif</i>						000. 00										000. 00	KEPA RIWI SATA AN DAN EKO NOMI KRE ATIF
		<i>Fasilitasi Sertifikasi Kompeten si Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif</i>	<i>Jumlah Orang yang difasilitas i Sertifikasi Kompeten si Subsektor Ekonomi Kreatif</i>	Or an g	227			40	250, 000, 000. 00	3 0	110, 000, 000. 00	3 0	110, 000, 000. 00	6 0	210, 000, 000. 00	6 0	210, 000, 000. 00	22 0	890, 000, 000. 00	ADIY ATA MA KEPA RIWI SATA AN DAN EKO NOMI KRE ATIF

Tabel 4.4

**Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program
Prioritas**

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	
			<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD</i>	
			<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	
			<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	
			<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD</i>	
			<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	
			<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	
			<i>Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah</i>	
			<i>Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	
			<i>Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah</i>	
			<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD</i>	

			<i>Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan</i>	
			<i>Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu</i>	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	
			<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	
			<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	
			<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	
			<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	
			<i>Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</i>	
			<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	
			<i>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			<i>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	
			<i>Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	
			<i>Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</i>	
			<i>Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	
			<i>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	

			<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	
			<i>Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD</i>	
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
			<i>Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	
			<i>Analisa & Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi</i>	
			<i>Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah</i>	
			<i>Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah</i>	
			<i>Pengolahan Data Retribusi Daerah</i>	
			<i>Penetapan Wajib Retribusi Daerah</i>	
			<i>Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	
			<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	
			<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	
			<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	
			<i>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	
			<i>Pemulangan Pegawai yang Pensiun</i>	
			<i>Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas</i>	
			<i>Pemindahan Tugas ASN</i>	
			<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	
			<i>Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan</i>	
			<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	

			<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	
			<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	
			<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	
			<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	
			<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	
			<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</i>	
			<i>Penyediaan Bahan/ Material</i>	
			<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	
			<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	
			<i>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	
			<i>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			<i>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	
			<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	
			<i>Pengadaan Alat Besar</i>	
			<i>Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor</i>	
			<i>Pengadaan Mebel</i>	
			<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	
			<i>Pengadaan Aset Tetap Lainnya</i>	
			<i>Pengadaan Aset Tak Berwujud</i>	
			<i>Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	
			<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	

			<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	
			<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	
			<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	
			<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	
			<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	
			<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar</i>	
			<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor</i>	
			<i>Pemeliharaan Mebel</i>	
			<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	
			<i>Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya</i>	
			<i>Pemeliharaan Aset Tak Berwujud</i>	
			<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	
			<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	

			<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatny a kunjungan jumlah wisatawan; (WISMAN, WISNUS)		
			<i>Penetapan rencana induk pariwisata di Kabupaten/Kota</i>	
			Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan di Kabupaten/Kota	
			<i>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</i>	
			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
			Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
			Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Kapasitas SDM pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
			Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
			<i>Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota</i>	
			<i>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	
			<i>Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	

			<i>Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	
			<i>Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	
			<i>Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	
			<i>Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	
			<i>Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	
			<i>Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis</i>	
			<i>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	
			<i>Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	
			<i>Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	
			<i>Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	
			<i>Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	
			<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	
			<i>Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	
			<i>Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	

			<i>Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya</i>	
			<i>Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	
			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI9042:2021)dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota	
			Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota	
			Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota	
			Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata Di Tingkat Kab/Kota	
			Sertifikat standar usaha pariwisata yang diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	
			Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	
			Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	
			Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten/Kota	

			Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya kunjungan jumlah wisatawan; (WISMAN, WISNUS)		
			<i>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	
			<i>Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri</i>	
			<i>Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri</i>	
			<i>Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	
			<i>Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata</i>	
			<i>Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri</i>	
			<i>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	
			<i>Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan</i>	
			<i>Fasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan</i>	

			<i>lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah</i>	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Meningkatnya nilai tambah fasilitas pendukung sektor pariwisata		
			<i>Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif Di Daerah Kabupaten/Kota</i>	
			<i>Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif</i>	
			<i>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</i>	
			<i>Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan</i>	
			<i>Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif</i>	
			<i>Fasilitasi pemberian insentif</i>	
			<i>Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah</i>	
			<i>Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)</i>	
			<i>Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual</i>	
			<i>Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual</i>	
			<i>Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah</i>	
			<i>Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif</i>	
			<i>Penyusunan Skema Insentif Daerah</i>	

			<i>Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah</i>	
			<i>Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</i>	
			<i>Perlindungan Hasil Kreativitas</i>	
			<i>Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual</i>	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya nilai tambah fasilitas penduduk sektor pariwisata		
			<i>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</i>	
			<i>Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif</i>	
			<i>Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</i>	
			<i>Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI</i>	
			<i>Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata</i>	
			<i>Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata</i>	
			<i>Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</i>	
			<i>Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (tidak ada dalam nomenklatur kepmendagri 900 tahun 2024)</i>	
			<i>Pelatihan Dasar Sdm Kepariwisata Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau</i>	

			<i>Siswa) (tidak ada dalam nomenklatur kepmendagri 900 tahun 2024)</i>	
			Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
			<i>Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif</i>	
			<i>Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha</i>	
			<i>Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Subsektor Ekonomi Kreatif</i>	
			<i>Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/ Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif</i>	
			<i>Pelatihan Asesor Kompetensi/ Workplace Assessor(WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif</i>	
			<i>Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif</i>	
			Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
			<i>Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</i>	

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

4.4 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan beberapa indikator kinerja utama (IKU). Pertama adalah Meningkatnya pengembangan potensi dan daya tarik wisata; meningkatnya nilai tambah fasilitas pendukung sektor pariwisata; dan meningkatnya kunjungan jumlah wisatawan. Untuk IKU meningkatnya pengembangan potensi dan daya tarik

wisata diukur dari indikator pertumbuhan PAD sektor pariwisata yang pada tahun 2025 akan dicapai 1,05%, tahun 2026 sebesar 1,06%, tahun 2027 sebesar 1,07%, tahun 2028 sebesar 1,08%, tahun 2029 sebesar 1,09, dan tahun 2030 sebesar 1,05. Untuk IKU meningkatnya nilai tambah fasilitas pendukung sektor swasta diukur dari kontribusi penyediaan akomodasi makan dan minum terhadap PDRB yang pada tahun 2025 target yang akan dicapai sebesar 0,28%, tahun 2026 sebesar 0,27%, tahun 2027 sebesar 0,25, tahun 2028 sebesar 0,24, tahun 2029 sebesar 0,22, dan tahun 2030 sebesar 0,21.

Sedangkan untuk IKU meningkatnya kunjungan jumlah wisatawan dapat diukur dari pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara dan pertumbuhan kunjungan wisatawan. Untuk indikator pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2025 memiliki target sebesar 44,15%, tahun 2026 sebesar 1,5%, tahun 2027 sebesar 1,6%, tahun 2028 sebesar 1,7%, tahun 2029 sebesar 1,80%, dan pada tahun 2030 sebesar 1,90%. Untuk indikator pertumbuhan kunjungan pariwisata pada tahun 2025 memiliki target sebesar 1,4%, tahun 2026 sebesar 1,5%, tahun 2027 sebesar 1,6%, tahun 2028 sebesar 1,7%, tahun 2029 sebesar 1,80%, dan pada tahun 2030 sebesar 1,90%.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Level	OPD	Definisi Operasional/ Cara Hitung	Base line (2024)	Target						Target Akhir	Sumber Data
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.1.3	Meningkatnya pengembangan potensi dan daya tarik wisata	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%	Tujuan OPD	Dinas Pariwisata	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama jumlah kunjungan wisatawan. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan akan berdampak positif pada PAD melalui berbagai jenis pajak dan retribusi, serta peningkatan pengeluaran	3.34	1.05	1.06	1.07	1.08	1.09	1.05	1.05	BPS/Dspar

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Level	OPD	Definisi Operasional/ Cara Hitung	Base line (2024)	Target						Target Akhir	Sumber Data
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						wisatawan yang berbelanja di daerah tersebut.									
1.1.3.1	Meningkatnya nilai tambah fasilitas pendukung sektor pariwisata	Kontribusi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap PDRB**	%	Sasaran OPD	Dinas Pariwisata	Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi: 1. Penyediaan	0.30	0.28	0.27	0.25	0.24	0.22	0.21	0.21	BPS/Dspar

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Level	OPD	Definisi Operasional/ Cara Hitung	Base line (2024)	Target						Target Akhir	Sumber Data
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						Akomodasi bagi Wisatawan dan 2. Penyediaan Jasa Makan dan Minum. Metode Perhitungan Rasio PDRB Penyediaan Akmamin = Nilai tambah penyediaan Akmamin dibagi Total PDRB x 100									
1.1.3.2	Meningkatnya kunjungan jumlah wisatawan	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Mancanegara	%	Sasaran OPD	Dinas Pariwisata	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Mancanegara dihitung dari Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	148.56	3,18	4,08	4,09	4,90	5,04	5,13	5,28	Dispar/Nespar da

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Level	OPD	Definisi Operasional/ Cara Hitung	Base line (2024)	Target						Target Akhir	Sumber Data
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						Tahun N dikurangi Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun N-1 dibagi Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun N-1 dikali 100									
		Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persen	Sasaran OPD	Dinas Pariwisata	Mengukur perubahan jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu destinasi wisata dalam periode waktu tertentu biasanya dibandingkan dengan periode	-20.58	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90	1.90	Dispar/Nespar da

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Level	OPD	Definisi Operasional/ Cara Hitung	Base line (2024)	Target						Target Akhir	Sumber Data
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						sebelumnya. $Pkw = \frac{(Wc - Wp)}{Wp} \times 100\%$ Keterangan: Pkw : Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan Wc: Jumlah kunjungan wisatawan pada periode saat ini Wp: Jumlah kunjungan wisatawan pada periode sebelumnya									

Terdapat tiga indikator kinerja daerah yang harus dicapai, diantaranya adalah rasio pdrb akomodasi makan dan minum; jumlah tamu wisatawan mancanegara; dan jumlah pelaku ekonomi kreatif. Pada indikator rasio PDRB akomodasi makan dan minum dengan target pada tahun 2025 adalah 0,28%, tahun 2026 adalah 0,27%, tahun 2027 adalah 0,25%, tahun 2028 adalah 0,24%, tahun 2029 adalah 0,22%, dan tahun 2030 adalah 0,21%. Pada indikator jumlah tamu wisatawan mancanegara pada tahun 2025 memiliki target 3924 orang, 2026 memiliki target 4084 orang, 2027 memiliki target 4284 orang, 2029 memiliki target 4731, dan pada tahun 2030 memiliki target 4981 orang. Sedangkan target jumlah pelaku ekonomi kreatif pada tahun 2025 memiliki target 4386 orang, 2026 memiliki target 4416 orang, 4436 memiliki target 4284 orang, 2029 memiliki target 4535 orang, dan pada tahun 2030 memiliki target 4584 orang.

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Daerah

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
III	Aspek Daya Saing Daerah									
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	0.30	0.28	0.27	0.25	0.24	0.22	0.21	
4	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	3803	3924	4084	4284	4500	4731	4981	
5	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	Orang	4386	4386	4416	4436	4486	4535	4584	

4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Terdapat tiga indikator kunci keberhasilan (IKK) Dinas Pariwisata, diantaranya adalah: Persentase Investasi sektor Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum; Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing; Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual.

Untuk IKK Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi makan dan minum diukur dari realisasi investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, dan minum dan realisasi investasi tahun N. Indikator realisasi investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, dan minum pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 0,37%, tahun 2026 ditargetkan sebesar 0,37%, tahun 2027 ditargetkan sebesar 0,38%, tahun 2028 ditargetkan sebesar 0,38%, dan tahun 2030 ditargetkan sebesar 0,38%. Sedangkan untuk indikator realisasi investasi pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 11,620,000,000,000, tahun 2026 ditargetkan sebesar 11,800,000,000,000, tahun 2027 ditargetkan sebesar 12,070,000,000,000, tahun 2028 ditargetkan sebesar 12,430,000,000,000, tahun 2029 sebesar 12,850,000,000,000, dan tahun 2030 ditargetkan sebesar 13,390,000,000,000.

Untuk IKK Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing diukur dari indikator Jumlah wisatawan asing tahun N – Jumlah wisatawan asing tahun N-1 dan Jumlah wisatawan asing tahun N-1. Jumlah wisatawan asing pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 3924, tahun 2026 ditargetkan sebesar 4,084, tahun 2027 ditargetkan sebesar 4284, tahun 2028 ditargetkan sebesar 4500, tahun 2029 ditargetkan sebesar 4731, dan tahun 2030 ditargetkan sebesar 4981. Jumlah wisatawan asing tahun N-1 pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 3803, tahun 2026 ditargetkan sebesar 3924, tahun 2027 ditargetkan sebesar 4,084, tahun 2028 ditargetkan sebesar 4500, tahun 2029 ditargetkan sebesar 4500, dan tahun 2030 ditargetkan sebesar 4731.

Untuk IKK Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual diukur dari indikator Identifikasi Pelaku Ekraf yang sudah memiliki HKI berdasarkan Sub-sektor Ekonomi Kreatif dan jumlah pelaku ekonomi kreatif. HKI berdasarkan Sub-sektor Ekonomi Kreatif pada tahun

2025 ditargetkan sebesar 31%, tahun 2026 ditargetkan sebesar 36%, tahun 2027 ditargetkan sebesar 41%, tahun 2028 ditargetkan sebesar 46%, tahun 2029 ditargetkan sebesar 51%, dan tahun 2030 ditargetkan sebesar 56%. Sedangkan jumlah pelaku ekonomi kreatif pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 4386, tahun 2026 ditargetkan sebesar 4416, tahun 2027 ditargetkan sebesar 4436, tahun 2028 ditargetkan sebesar 4486, tahun 2029 ditargetkan sebesar 4535, dan tahun 2030 ditargetkan sebesar 4584.

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Kunci

No	IKK	Rumus	Satuan	Bobot	Target												
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
1	Persentase Investasi sektor Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum yang dapat diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Realisasi investasi sektor Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	x	%	34%	43,00	0.3	44,3	0.3	45,8	0.3	47,3	0.3	49,4	0.3	51,8	0.3
		Realisasi Investasi tahun N	100%			0,000	70	34,0	75	77,0	80	90,0	81	69,0	84	06,0	86
						,000	05	00,0	71	00,0	09	00,0	26	00,0	97	00,0	90
								00		00		00		00		00	
						11,62		11,8		12,0		12,4		12,8		13,3	
						0,000		00,0		70,0		30,0		50,0		90,0	
						,000,		00,0		00,0		00,0		00,0		00,0	
						000		00,0		00,0		00,0		00,0		00,0	
								00		00		00		00		00	
2	Persentase pertumbuhan jumlah	Jumlah wisatawan asing tahun N – Jumlah wisatawan asing tahun N-1	x	%	33%	3924	3.1	4,08	4.0	428	4.8	450	5.0	473	5.1	4981	5.2
			100%				82	4	77	4	97	0	42	1	33		84
												0					

	wisatawan asing	Jumlah wisatawan asing tahun N-1				3803		3924		4,084		4284		4500		4731	
3	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	Identifikasi Pelaku Ekraf yang sudah memiliki HKI berdasarkan Sub-sektor Ekonomi Kreatif Data dapat diperoleh dari Kanwil Kemenkumham	x	%	33%	31	0.707	36	0.815	41	0.924	46	1.025	51	1.125	56	1.222
		Jumlah pelaku ekonomi kreatif				4386		4416		4436		4486		4535		4584	

BAB V

PENUTUP

Sasaran strategis yang hendak dicapai dalam periode perencanaan ini meliputi dua arah utama, yaitu (1) Pengembangan Pariwisata Kutai Kartanegara dan (2) Pengembangan Ekonomi Kreatif Kutai Kartanegara. Melalui kedua sasaran tersebut, Dinas Pariwisata menargetkan peningkatan signifikan terhadap sejumlah indikator kinerja utama, antara lain: pertumbuhan kunjungan wisatawan rata-rata 8–10% per tahun, peningkatan kontribusi PAD sektor pariwisata hingga mencapai 9% terhadap total PAD daerah pada tahun 2030, serta peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif yang aktif dan memiliki perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) hingga 60% dari total pelaku usaha kreatif di Kutai Kartanegara. Selain itu, indeks daya tarik destinasi wisata ditargetkan meningkat secara berkelanjutan seiring penguatan infrastruktur, promosi digital, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra, Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara menerapkan prinsip pengendalian dan evaluasi yang terukur sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Evaluasi kinerja dilakukan setiap tahun melalui pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), sedangkan evaluasi lima tahunan digunakan sebagai dasar penyempurnaan arah kebijakan dan perencanaan periode berikutnya.

Arah Kebijakan Pelaksanaan dan Evaluasi

Untuk memastikan efektivitas implementasi Renstra 2025–2030, Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara menetapkan arah kebijakan pelaksanaan dan evaluasi sebagai berikut:

1. Sinergi dan Kolaborasi — Penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, dunia usaha, komunitas pariwisata, akademisi, dan masyarakat dalam pengembangan destinasi serta ekonomi kreatif.

2. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan — Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap capaian indikator kinerja, agar program dan kegiatan tetap pada jalur sasaran pembangunan daerah.
3. Inovasi dan Adaptabilitas — Pengembangan kebijakan yang adaptif terhadap tren wisata, digitalisasi promosi, serta dinamika ekonomi kreatif berbasis teknologi dan budaya lokal.
4. Transparansi dan Akuntabilitas — Penerapan tata kelola program dan keuangan yang transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
5. Keberlanjutan dan Kemandirian — Penguatan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat (community-based tourism) yang ramah lingkungan dan berdaya saing tinggi.

Dengan arah kebijakan dan target yang terukur tersebut, Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara berkomitmen mewujudkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penggerak utama pembangunan daerah. Diharapkan, pada tahun 2030, Kutai Kartanegara menjadi salah satu kabupaten tujuan wisata unggulan di Kalimantan Timur yang berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Tenggarong, 9 Februari 2026

Plt. Kepala Dinas,



Awang Agus Dharmawan, SE., M.Si

Pembina TK 1 (IV.b)

NIP. 19720828 200112 1 008